



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**UPAYA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI
(STUDI KASUS PADA PENYELUNDUPAN BARANG)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AKBAR

NIM. 014965328

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK

UPAYA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI (Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang)

Akbar

akbar.thahir@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Sebagai salah satu wilayah yang berada di perbatasan antar negara, Kepulauan Riau memiliki berbagai tantangan. Tantangan yang paling menonjol yaitu adanya kesenjangan ekonomi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah tetangga. Kesenjangan ekonomi ini menyebabkan berbagai kemungkinan diantaranya kegiatan-kegiatan perdagangan ilegal. Penjualan barang-barang kebutuhan seperti perabot rumah tangga, pakaian, makanan sering terjadi akibat adanya kesenjangan tersebut. Untuk meminimalisir praktek-praktek ilegal tersebut Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kepulauan Riau telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah meningkatkan keamanan. Setiap barang yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau diperiksa keabsahannya baik dari sisi bahan barangnya hingga pada kelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya. Disamping melakukan verifikasi atas masuknya barang-barang impor, Badan Pengelola Perbatasan juga telah melakukan sinergi dengan stakeholder lainnya khususnya dalam bidang infrastruktur. Penyamaan visi dan misi serta mengintensifkan koordinasi dengan instansi lain serta melaksanakan on board (patroli bersama) .

Kata Kunci: Upaya BPP, Penyelundupan, Barang-barang ilegal

ABSTRACT**UPAYA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI
(Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang)****Akbar****akbar.thahir@gmail.com****Graduate Studies Program
Indonesia Open University**

Bordering with neighbor countries makes Riau Island province faces several defiance. One of the major defiance mentioned before is the existence of economic gap between the Government of Indonesia with the neighboring Government. This gap causes various illegal activities such as smuggling of goods, home furnishings, clothing, and food. To prevent those illegal activities, the Border Management Agency (BPP) of Riau Islands has done several efforts. The main attempt is to examine the validity goods materials and their supporting documents. Another attempt is to conduct a cooperation with other stakeholders involving in border management issues. This cooperation is implemented by harmonizing all stakeholder vision and mission and do joint patrol not only on the land but also on the sea.

Key words: Effort BPP, smuggling, illegal activities

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Upaya Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI dengan Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 25 Mei 2018

Yang Menyatakan



(AKBAR, S.ST)

NIM 014965328

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : AKBAR, S.ST
 NIM : 014965328
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : UPAYA BADAN PENGELOLA PERBATASAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM
 MENJAGA KEDAULATAN NKRI dengan Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang

TAPM telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Oktober 2018
 Waktu : 10.00 – 11.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A

Pembimbing I

Nama : Drs. Djaka Permana, M.Si, Ph.D

Pembimbing II

Nama : Dr. Gimin, M. Pd

**PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG**

Judul TAPM : Upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjaga
Kedaulatan NKRI (Studi Kasus Pada Penyelundupan Barang)

Penyusun TAPM : AKBAR, S.ST

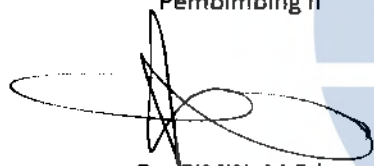
NIM : 014965328

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Kamis / 4 Oktober 2018

MENYETUJUI :

Pembimbing II



Dr. GIMIN, M.Pd

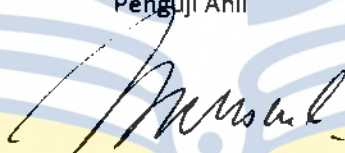
NIP. 19600910 198703 1 004

Pembimbing I



Drs. DJAKA PERMANA, M. Si, Ph.D

Penguji Ahli



Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A

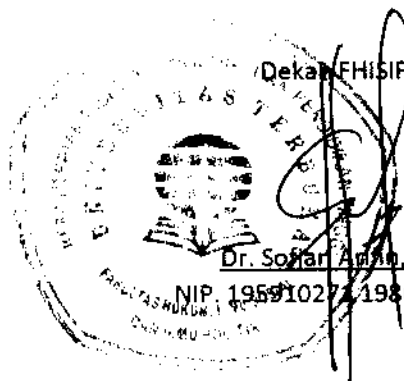
Mengetahui :

Ketua Pascasarjana Magister
Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed

NIP. 195910271 198603 1 003



Dekan FHSIP

Dr. Sofar Anjo, MSI

NIP. 195910271 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis lafadzkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan izin dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa tesis. Penyusunan tesis ini penulis akui berat mengingat posisi penulis yang berangkat bukan dari kalangan akademisi melainkan dari kalangan birokrasi. Apalagi ditengah penyusunan tesis ini penulis harus tetap menjalankan tugas-tugas rutin kantor yang semakin hari semakin kompleks. Shalawat teriring salam penulis sampaikan kepada Rasul junjungan alam, Nabi MUHAMMAD SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan panduan kepada umat manusia khususnya umat muslim sehingga bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini terutama :

1. Rektor Universitas Terbuka yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Pak Djaka dan Pak Gimin yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menyusun tesis ini.
3. Seluruh narasumber baik dari POLDA Kepri, Imigrasi, Bea Cukai yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
4. Terkhusus buat Ibunda dan Istri tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan serta rela waktunya tersita agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena ini maka saran dan masukan akan sangat berrati bagi penelitian-pencelitian selanjutnya.

Tanjungpinang,

Penulis

Akbar
NIM 014965328



Nama : Akbar

NIM : 014965328

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat/tanggal lahir : Tanjungpinang/12 April 1980

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Tanjungpinang pada tahun 1992

Lulus SMP di Tanjungpinang pada tahun 1995

Lulus SMA di Tanjungpinang pada tahun 1998

Lulus Sarjana di Jakarta pada tahun 2003

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2011 s/d 2017 sebagai Kasubbid Pengelolaan Lintas Batas di Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Tahun 2017 s/d sekarang sebagai Kasubbag Pengembangan Kebijakan Program di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Jakarta,2018

viii

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR LAYAK UJI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Teori.....	16
1. Kebijakan publik.....	16
2. Manajemen Strategi.....	43
3. Konsepsi tentang Wilayah Perbatasan Negara.....	50

4. Teori Kedaulatan Negara	56
5. Penyelundupan Barang.....	59
6. Konsep kebijakan bidang hukum, keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam pengelolaan wilayah perbatasan.....	62
7. Strategi Pengelolaan Daerah Perbatasan	70
B. Penelitian Terdahulu.....	76
C. Kerangka Berfikir.....	83
BAB III METODE PENELITIAN.....	85
A. Pendekatan Penelitian	85
B. Teknik Pengumpulan Data	86
C. Instrumen Penelitian.....	87
D. Penentuan Informan	88
E. Teknik Analisis Data	90
F. Pengujian Keabsahan Data	92
G. Objek Penelitian	93
H. Subjek Penelitian.....	93
I. Instrumen Penelitian	94
BAB IV GAMBARAN UMUM PERBATASAN DI KEPULAUAN RIAU	95
A. Dinamika Perbatasan Antar Negara	95
B. Badan Pengelola Perbatasan.....	99
1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.....	101
2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Batas Negara.....	103

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan.....	106
4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan.	108
5. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	110
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	112
A. Karakteristik Respoden.....	112
B. Upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI.....	114
1. Bidang Penegakan Hukum dan Kebijakan.....	115
2. Bidang Keuangan.....	118
3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM).....	120
4. Bidang Infrastruktur.....	123
B. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan NKRI.....	127
C. Pembahasan.....	129
BAB VI PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
Lampiran 1 Struktur Organisasi BPP Provinsi kepulauan Riau.....	144
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	145
Lampiran 3 Transkrip Wawancara.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang luas dan memiliki banyak pulau yang mana diantaranya berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Khususnya Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Adanya masalah perbatasan antara Indonesia dengan Negara tetangga seperti kehilangannya Indonesia terhadap pulau yang sekarang dimiliki oleh Negara tetangga antara lain Malaysia dan Timor Leste, oleh sebab itu untuk menjaga Kedaulatan NKRI dari ancaman – ancaman dari Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, maka Presiden membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian dibentuk juga di wilayah Provinsi yang memiliki pulau berbatasan langsung dengan Negara tetangga, salah satunya di Provinsi Kepulauan Riau dengan nama Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu Provinsi yang memiliki luas lautan sekitar (95,79%) atau 241.215,30 km² terdiri atas laut, sedangkan luas daratannya hanya 10.595,41 km² (4,21%) , dimana untuk menjangkau pulau yang satu dengan yang lainnya sangat sulit. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 7 kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Bintan (Ibukota : Bintan Buyu), Kabupaten Karimun (Ibukota : Tanjung Balai), Kabupaten Lingga (Ibukota :

Daik), Kabupaten Kepulauan Anambas (Ibukota : Tarempa), Kabupaten Natuna (Ibukota : Ranai), Kota Batam (Ibukota : Batam) dan Kota Tanjungpinang dengan Ibukota Tanjungpinang (Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, BPS Kepri Tanjungpinang, 2014, hlm.12

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, pada Bab V tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional khususnya pada Pasal 76 point C. Pasal 76 point C menyatakan bahwa wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga dan/atau laut lepas. Saat ini Presiden telah menetapkan 111 pulau sebagai pulau-pilau terluar yang ada di Indonesia. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kepres yang ditandatangani tanggal 2 Maret 2017 ini telah menetapkan Kepulauan Riau sebagai wilayah dengan Pulau Kecil dan Terluar sebanyak 22 (dua puluh dua) buah, diantara pulau-pulau tersebut adalah Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Tokong Malang Biri, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokongbelayar, Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Tokonghiu Kecil, Pulau Karimun Anak, Pulau Nipa, Pulau Pelampung, Pulau Batuberantai, Pulau Putri, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun.

Ke-22 buah pulau tersebut secara administrasi berada di 6 Kabupaten / Kota kecuali Lingga. Berikut beberapa titik Pulau Terluar yang ada di Kepulauan Riau dan juga berbatasan dengan negara tetangga diantaranya: 7

buah di Kabupaten Natuna, antara lain : Pulau Kepala ($02^{\circ}38'43''\text{LU}$, $109^{\circ}10'04''\text{BT}$), Pulau Sebetul ($04^{\circ}42'25''\text{LU}$, $107^{\circ}54'20''\text{BT}$), Pulau Sekatung ($04^{\circ}47'38''\text{LU}$, $108^{\circ}00'39''\text{BT}$), Pulau Semiun ($04^{\circ}31'09''\text{LU}$, $107^{\circ}43'17''\text{BT}$), Pulau Senoa ($04^{\circ}00'48''\text{LU}$, $108^{\circ}25'04''\text{BT}$), Pulau Subi Kecil ($04^{\circ}01'51''\text{LU}$, $108^{\circ}54'52''\text{BT}$), Pulau Tokong Boro ($04^{\circ}04'01''\text{LU}$, $107^{\circ}26'29''\text{BT}$), 5 buah di Kabupaten Kepulauan Anambas, antara lain : Pulau Damar ($02^{\circ}44'29''\text{LU}$, $105^{\circ}22'46''\text{BT}$), Pulau Mangkai ($03^{\circ}05'32''\text{LU}$, $105^{\circ}53'00''\text{BT}$), Pulau Tokong Berlayar ($03^{\circ}20'74''\text{LU}$, $106^{\circ}16'08''\text{BT}$), Pulau Tokong Malang Biru ($02^{\circ}18'00''\text{LU}$, $105^{\circ}34'07''\text{BT}$), Pulau Tokong Nanas ($03^{\circ}19'52''\text{LU}$, $105^{\circ}57'04''\text{BT}$), 2 buah di Kabupaten Karimun , antara lain : Pulau Iyu Kecil ($01^{\circ}11'25''\text{LU}$, $103^{\circ}21'08''\text{BT}$) dan Pulau Karimun Kecil ($01^{\circ}09'59''\text{LU}$, $103^{\circ}23'20''\text{BT}$), 4 buah di Kota Batam, antara lain : Pulau Batu Berbanti ($01^{\circ}11'06''\text{LU}$, $103^{\circ}52'57''\text{BT}$), Pulau Nipah ($01^{\circ}09'13''\text{LU}$, $103^{\circ}39'11''\text{BT}$), Pulau Nongsa ($01^{\circ}12'29''\text{LU}$, $104^{\circ}04'47''\text{BT}$), Pulau Pelampong ($01^{\circ}07'44''\text{LU}$, $103^{\circ}41'58''\text{BT}$), dan 1 di Kabupaten Bintan, yaitu : Pulau Sentut ($01^{\circ}02'52''\text{LU}$, $104^{\circ}49'50''\text{BT}$) , (Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, BPS Kepri Tanjungpinang, 2014, hlm.xlix).

Dengan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan beberapa Negara tetangga, tentu dapat memberikan keuntungan maupun kerugian. Dianggap memberikan keuntungan jika Provinsi Kepulauan Riau dapat memanfaatkanya dengan baik sehingga memberikan kontribusi seperti pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak mampu

memanfaatkannya, posisi kepri yang berada di perbatasan antar negara menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan wilayah.

Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional. Pengembangan pusat-pusat kegiatan strategis di Kepulauan Riau membutuhkan dukungan multisektor dan kebijakan pemerintah yang kondusif bagi dunia usaha, termasuk insentif yang benar-benar dapat menjadi daya tarik bagi dunia usaha. Berbagai upaya lain juga dibutuhkan, terutama percepatan pembangunan sarana dan prasarana dasar pendukung pengembangan potensi ekonomi kawasan dan perdagangan maupun pelayanan publik yang memadai di kawasan perbatasan. (Sumber: Grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Indonesia tahun 2011 – 2025).

Untuk lebih memberikan pemahaman operasionalnya, dikaitkan dengan spirit dan amanah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Undang-undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka pengelolaan perbatasan, dimaknai sebagai upaya bagaimana menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di NKRI. Pengelolaan perbatasan itu tidak

hanya menyangkut pemerataan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, namun juga faktor pertahanan keamanan. Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo mengatakan bahwa alasan utama yang dijadikan acuan untuk melakukan percepatan pembangunan di daerah perbatasan adalah salah satunya ingin mewujudkan Nawa Cita Jokowi. Sembilan (9) cita-cita yang ingin diwujudkan Pemerintahan Jokowi-JK adalah “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangun pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”. Selain itu pemerintah juga berkomitmen untuk “mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam”.

Namun demikian, hingga saat ini masih banyak permasalahan yang ada di daerah perbatasan dan belum dapat diselesaikan pemerintah. Mulai masih banyaknya perdagangan manusia, perdagangan barang-barang ilegal seperti narkoba, ilegal mining, ilegal fishing dan masih banyak aktifitas ilegal lainnya. Bahkan untuk di wilayah Kepulauan Riau masih banyak dan marak terjadi jual beli barang seken (bekas) ditengah-tengah masyarakat seperti perabot rumah tangga, pakaian bekas dan lain-lain.

Wajah perbatasan ini sangat-sangat memprihatinkan, oleh karena itu harus ada percepatan pembangunan infrastruktur. Saat ini saja terdapat 39 (tiga puluh sembilan) jalur “tikus” Illegal, sampai di Atambua itu tempat penyelundupan

narkoba, kemudian di Kepri dan juga termasuk Sebatik, Entikong, masuknya lebih dari 200 warga Negara asing yang masuk ke Indonesia dan berjihad di Indonesia. Ketimpangan pembangunan dan infrastruktur menjadi pangkal problem perbatasan (Sumber : <http://Setkab.go.id> diakses 29 Januari 2017, jam 17.00 WIB).

Sesuai dengan amanat Perpres 12 Tahun 2010, di provinsi dan kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan antar Negara, akan dihentuk satuan kerja pengelola perbatasan dengan kewenangan menangani urusan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah. Untuk menegaskan mana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau daerah dalam pengelolaan perbatasan, diperlukan pengaturan pembagian dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, dari segi sistem penganggaran dan akuntabilitasnya, badan pengelola perbatasan di daerah ini dibiayai dari APBD. Sedangkan pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat, pembiayaannya berasal dari APBN melalui mekanisme dekonsentrasi atau pembantuan.

Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan melalui instrument pembangunan di garis batas wilayah negara maupun di kawasan perbatasan, dalam skala pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memerlukan kejelasan kewenangan dan keterpaduan. Terdapat prinsip dasar dalam menjalankan suatu program. Prinsip dasar tersebut dikenal dengan istilah "Money Follow Function". Prinsip *Money Follow Program* yang diterapkan dalam sistem

anggaran kinerja Provinsi Kepulauan Riau saat ini merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat, Penganggaran *Money Follow Program* juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yaitu perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Dalam menjalankan *Prinsip Money Follow Program* juga memerlukan kejelasan akuntabilitas atas pembiayaan kegiatan menurut kewenangan, antara pusat dan daerah untuk berbagai program dan kegiatan pengelolaan perbatasan, serta memerlukan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam perencanaan keuangan terkait program/kegiatan yang akan dijalankan.

Secara umum terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bentangan kawasan perbatasan sangat luas;
2. Masih kurangnya pengelolaan potensi dan sumber daya alam baik oleh negara maupun swasta;
3. Penanganan perbatasan belum maksimal dan masih bersifat parsial/ sektoral;
4. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan masyarakat tetangga seperti Malaysia dan Singapura;

5. Masih minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan, hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap berbagai pelanggaran batas negara;
6. Belum terpadunya program dan kegiatan pengembangan kawasan perbatasan.

Berbagai tantangan tersebut memicu timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak dapat kita elakkan lagi. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh karena kondisi “hijanya” negeri tetangga dan “gersangnya” kondisi ekonomi di negeri sendiri. Kesenjangan kondisi sosial ekonomi “hijau vs gersang” tersebut semakin nyata terasa karena secara geografis antara Indonesia dan negeri tetangga sangat dekat jaraknya. Kedekatan geografis yang menjadi perbatasan dengan Negara tetangga tersebut akhirnya memicu timbulkan masalah sosial dan ekonomi diantaranya yaitu penyelundupan barang-barang pokok dan barang-barang pelengkap kebutuhan hidup lainnya.

Hingga saat ini, masih banyak barang selundupan yang dengan mudah ditemukan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Aneka barang selundupan seperti produk makanan, obat-obatan, kosmetik, rokok, elektronik dan sebagainya dijual secara terang-terangan di toko besar maupun toko kecil. Dari tahun ketahun intensitas dan volume penyelundupan barang terus terjadi di Provinsi kepulauan Riau. Mulai dari penyelundupan barang bekas hingga penyelundupan barang mewah dan bahkan barang-barang terlarang seperti Narkotika dan Obat-obatan terlarang lainnya.

Untuk penyelundupan barang bekas seperti barang elektronik, perabot rumah tangga hingga baju-baju bekas masih marak terjadi di Kepulauan Riau. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Youtube yang mengatakan bahwa “Bea Cukai Kepulauan Riau menangkap KM Sapokat yang akan menyelundupkan rihuan karung berisi pakaian bekas asal Port Klang, Malaysia. Penangkapan dilakukan karena pengiriman barang tidak dilengkapi dokumen lengkap”.

Lebih berita itu berita nasional “Antara” juga telah memberitakan pada bulan Oktober tahun 2013 bahwa Bea Cukai telah menggagalkan penyelundupan Kamera sebanyak 30 koli atau setara dengan 500 unit seharga 6 milyar. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kabid Penyidikan dan Penanganan Barang Hasil Penindakan Kanwil BC Kepri Budi Santoso yang didampingi oleh Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Agus Wahono dan Kepala Seksi Penindakan Agustyan. Lebih lanjut ia Agus Wahono mengatakan “Jumlahnya 30 koli, terdiri atas kamera dan lensa merek Canon berbagai tipe dengan harga diperkirakan berkisar Rp 5 juta hingga Rp 25 juta. Sedangkan nilai seluruhnya sekitar Rp 6 miliar.”

Bahkan di Kepulauan Riau juga telah beberapa dilakukan penangkapan terhadap pengedar dan bahkan produsen narkoba. Seperti halnya dengan penyelundupan narkoba juga pernah diberitakan oleh Tribunnews.com yang dipublikasi pada Senin, 24 Desember 2012 16:53 WIB dengan judul berita “BC Tanjungpinang Batalan Penyelundupan 3,4 kg Heroin”. Sepanjang tahun 2015, masalah penyelundupan barang masih mewarnai pemberitaan media

lokal di Kepri, bahkan juga media nasional. Misalnya, pada bulan September tahun 2015 diberitakan adanya penyelundupan beras di Kabupaten Karimun (Sumber: Batampos yang diakses pada tanggal 5 Desember 2015). Selanjutnya pada bulan Oktober 2015, kasus beras ilegal juga mewarnai pemberitaan media di Batam. Pada bulan November 2015 juga dilakukan pemusnahan dua truk barang kosmetik yang masuk secara ilegal senilai Rp 821 juta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau.

Banjirnya barang ilegal di wilayah Kepri menurut pihak Bea Cukai Batam karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, sehingga memudahkan para pelaku penyelundupkan barang-barang ilegal melalui jalur yang tidak resmi yang membentang luas di Batam. Jika melalui pelabuhan resmi, maka kecil kemungkinan barang ilegal tersebut bisa lolos adanya tanpa izin.

Aksi penyelundup ini bukan hanya merugikan Negara secara finansial, tetapi juga melemahkan wibawa pemerintah. Negara ibarat bangunan rumah tangga, tetapi dalam bentuk yang lebih besar. Negara memerlukan pemasukan atau dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara. Sebagai pemasukan utama negara adalah dari pajak negara dan bea serta cukai yang telah tertuang dalam APBN. Pendapatan negara yang berasal dari Bea dan Cukai tersebut disamping menjadi sumber penerimaan pemasukan, juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta perluasan kesempatan lapangan kerja.

Dengan tidak masuknya dana yang bersal dari bea dan cukai, maka negara telah mengalami kerugian yang sangat besar. Negara mengalami kerugian yang di sebabkan oleh lengahnya pengawasan dari pihak Bea dan Cukai. Sehingga setiap barang-barang yang masuk ke wilayah NKRI harus melawati lembaga Bea dan Cukai. Tidak boleh ada barang-barang yang masuk ke wilayah NKRI tanpa sepengetahuam Bea dan Cukai. Jika ada barang yang masuk wilayah NKRI dan tanpa sepengetahuan Bea dan Cuka itulah yang disebut dengan barang selundupan atau barang ilegal.

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 44 tahun 2007 tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun atau yang lebih dikenal dengan istilah Free Trade Zone (FTZ BBK), Direktorat Bea dan Cukai (BC) semakin kerepotan untuk melakukan pengawasan. Hal ini dikarenakan ada zona-zona tertentu dimana barang-barang bebas keluar masuk ke wilayah Kepri. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya pelabuhan ilegal alias pelabuhan tikus di wilayah Kepri. Beraneka jenis barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen ekspor-impor dan kepabeanan diduga setiap hari masuk ke wilayah Kepri. Penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan dan petugas BC diduga hanya sebagian kecil saja. Sebagian besar barang-barang ilegal itu berhasil diselundupkan melalui puluhan pelabuhan tikus yang tersebar di sejumlah titik di Kepri tersebut.

Mengacu pada Perpres No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, pada pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi

dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan berada di kecamatan. Adapun Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Sementara itu pada pasal 5, bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, dan tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut, pengamatan kawasan perbatasan, dan pengembangan kawasan perbatasan.

Kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negatif di mata dunia. Citra negatif yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu-lalangnya tenaga kerja yang bermasalah atau ilegal (*illegal workers*), pembalakan dan penggundulan hutan (*illegal logging*), dan penyelundupan (*smuggling*). Selain itu, Indonesia juga mengalami ketertinggalan dalam infrastruktur di kawasan perbatasan sehingga seringkali munculnya ketegangan-ketegangan sebagai akibat isolasi wilayah. Bahkan jika perbatasan ini tidak dijaga secara ketat dan dibiarkan begitu saja, akan menyebabkan kawasan ini menjadi pintu masuk bagi para teroris antar negara (*transnational terrorists*).

Menyadari tantangan yang demikian besar akibat kondisi geografis tersebut diatas, maka Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Riau selanjutnya disebut BP Perbatasan Kepulauan Riau telah menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015. Dalam dokumen tersebut BP Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan identifikasi berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau baik yang berkaitan dengan permasalahan batas antar negara hingga persoalan wawasan kebangsaan.

Terkait dengan permasalahan itu “lemahnya kelembagaan pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan”, BP Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan inventarisasi masalah kedalam 3 (tiga) isu utama yaitu; 1) Isu kawasan perbatasan belum menjadi agenda pembangunan prioritas yang ditangani secara komprehensif dan terpadu; 2) Meningkatnya aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, dan 3) Lemahnya penegakan hukum terhadap para pencuri kayu (*illegal logger*), penyelundup barang, penjualan manusia (*human trafficking*), pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian ikan, terutama pada *grey area*.

Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP, merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya percepatan penyelesaian masalah perbatasan negara. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai scrambi depan negara, yang berorientasi *outward looking* atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

BNPP mengemban visi “mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mengacu kepada seluruh uraian diatas penulis tertarik untuk lakukan penelitian tentang kebijakan Pemerintah / Pemprov Kepri khususnya melalui Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga wibawa kedaulatan NKRI terutamanya dalam meminimalisasi kasus penyelundupan barang. Alasan penulis memilih studi kasus penyelundupan barang karena sebagai putra daerah dan anak bangsa merasa sangat prihatin atas kerugian Negara secara *financial* sebagai akibat tindakan pemasukan barang-barang dari berbagai Negara ke dalam wilayah Pemprov Kepri secara ilegal, dan memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang yang terkait tentang langkah-langkah meminimalisasi kegiatan penyelundupan barang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui pencegahan penyelundupan kabarang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat upaya penanganan penyelundupan barang di wilayah Kepulauan Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani masalah penyelundupan barang.
2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat upaya penanganan penyelundupan barang di wilayah Kepulauan Riau.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang Kebijakan Publik
2. Untuk memberikan saran dan masukan bagi BP Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan itu sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Selanjutnya oleh Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) mengatakan bahwa “kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan”. *Policy* atau kebijakan berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian “pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan”. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa “kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri”. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

a. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana mengartikannya. David Easton sebagaimana yang dikutip oleh Gunnell (2013, 190-210) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*". Maksudnya bahwa dalam membuat kebijakan publik perlu adanya pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2008:53) juga mengartikan kebijakan publik sebagai "*a projected program of goal, value, and practice*". Dengan kata lain bahwa suatu kebijakan publik merupakan sesuatu program untuk pencapaian tujuan dengan didasari atas nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan”. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah atau *non state actor*. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

William N. Dunn (2003:132) menyebut istilah kebijakan publik sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Kebijakan Publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn tersebut diatas mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Hersel Nogi S. Tangkilisan (2003:1) dengan mengutip pendapat Thomas R. Dye

mengartikan bahwa *"public policy is whatever governments choose to or not to do"*.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Dye tersebut diatas maka maksud dari kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Pendapat yang senada dengan Dye juga disampaikan oleh Edward dan Sharkansky sebagaimana yang dikutip oleh Widodo (2001:190) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah: *"What government say and do, or not todo. It is the goals or purpose of government programs"*.

Pendapat Edward dan Sharkansky tersebut diatas juga mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Solichin Abdul Wahab (2005:3) dengan mengutip pendapat Friedrich mengartikan bahwa kebijakan adalah

"suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan".

Lebih lanjut Harold D. Laswell (Widodo, 2001:190) mengartikan bahwa;

"kebijakan merupakan tugas intelektual dalam pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu: penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi".

Apa yang dikatakan oleh Anderson tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood (Nakamura, 1980:31) mengemukakan pengertian kebijakan publik yaitu *"A set of instruction from policy makers to policy implementers that spell out both goals and the mean for achieving those goals"*.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan, lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi.

Kartasasmita (Widodo, 2001:189) juga mengemukakan pengertian kebijakan publik yang merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan kedalam beberapa hal yaitu:

"1). Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah. 2). Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya dan 3). Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut".

Apa yang dikatakan oleh Kartasasmita tersebut memiliki makna yang luas apa yang dimaksud dengan kebijakan. Kebijakan bukan hanya menyangkut mengenai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah,

melainkan juga menyangkut tentang apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi sebuah kebijakan dikeluarkan.

Sebuah kebijakan lahir bertujuan untuk memecahkan suatu masalah atau isu yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian maka sebuah kebijakan harus mampu mengetahui pengaruh dan dampaknya terhadap masyarakat. Lebih lanjut Miriam Budiardjo (2005:56) mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Berdasarkan beberapa pengertian yang disampaikan oleh pakar tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam hal ini pemerintah. Pemerintah berusaha untuk menentukan tujuan dan sekaligus cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut. Lebih jauh Dahlan Thaib dan Jazim Hamidi (2001:77) mengemukakan pengertian kebijakan adalah “segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa dalam ketatanegaraan”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditemukan beberapa elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo. Anderson (Widodo, 2001:190) mengemukakan adanya 5 (lima) elemen pokok dalam kebijakan publik diantaranya adalah:

- “1).Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 2).Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 3).Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud

akan dilakukan. 4).Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), dan 5).Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)".

Dari 5 (lima) Elemen dasar yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.

b. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah.

Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (2003 : 3-4) adalah

"political science is also the study of public policy-the description and explanation of the cause and consequences of the impact of social,economic, and political forces on the content of public policy; an inquiry into the effect of various institutional arrangements and political processes on public policy;and an evaluation of the consequences of public policies on society, both expected and unexpected".

Lebih lanjut Thomas R. Dye (2003:4) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari. Diantara beberapa alasan penting tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Alasan Ilmiah. Memahami penyebab dan konsekuensi dari sebuah keputusan atau kebijakan. Dengan demikian maka semakin banyak keputusan yang diambil maka sejogjanya keputusan tersebut akan

semakin berkualitas. Studi kebijakan membantu kita belajar tentang hubungan antara kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat, respon dari sistem politik untuk kondisi saat ini, dan efek, jika ada, dari kegiatan pemerintah pada kondisi saat ini. Studi kebijakan publik menggabungkan ide-ide sosiologi, antropologi, psikologi, sejarah, hukum, dan administrasi publik, serta ilmu politik. Untuk menambah luasnya, signifikansi, kehandalan, dan pengembangan teori ilmu-ilmu sosial secara umum.

- 2) Alasan professional. Kebijakan publik juga dapat dipelajari untuk alasan professional. Alasan profesional yang dimaksud adalah untuk memahami penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik yaitu memungkinkan kita untuk menerapkan pengetahuan ilmu sosial untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang bersifat praktis. Pengetahuan faktual merupakan prasyarat untuk sebuah resep terhadap penyakit masyarakat. Jika terdapat tujuan tertentu yang diinginkan, maka pertanyaan tentang apa kebijakan terbaik akan melaksanakannya adalah pertanyaan faktual yang membutuhkan studi ilmiah. Dengan kata lain, studi kebijakan dapat menghasilkan alasan professional yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan tentang “bagaimana untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Lembaga pemerintah, serta organisasi yang fokus terhadap penelitian kebijakan memiliki lebih banyak daya kritik dan sekaligus memiliki kepedulian terhadap berbagai pengetahuan tentang kebijakan dari pada dengan perkembangan teori ilmiah semata.

3) Rekomendasi Penelitian. Kebijakan publik dapat dipelajari untuk tujuan politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu bangsa telah mengadopsi secara benar sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan yang benar. Hal tersebut sering dikatakan bahwa ilmu politik tidak harus berdiam dalam menghadapi krisis sosial dan krisis politik. Seorang ilmuwan politik memiliki kewajiban moral untuk memajukan kebijakan publik tertentu. Ilmuwan politik harus memiliki fokus terhadap lembaga, proses atau perilaku yang terkadang sering terlihat sebagai “kanan”, bahkan dikatakan “tidak relevan” dan “tidak bermoral”. Studi kebijakan dapat dilakukan tidak hanya untuk tujuan ilmiah dan profesional tapi juga untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan sesuatu hal yang patut didiskusikan. Diskusi untuk memajukan tingkat kesadaran politik dan sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan publik. Tentu saja, ini adalah tujuan yang sangat subjective dan tidak selalu setuju pada apa yang merupakan pilihan berupa keanehan akan sebuah tujuan, tetapi juga akan menganggap bahwa pengetahuan adalah hal yang lebih baik dibandingkan dengan ketidaktahuan.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Tujuan pembagian tahapan dalam penyusunan kebijakan publik adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli membagi tahap-tahap dalam penyusunan kebijakan publik dengan urutan yang berbeda-beda. Berikut tahap-tahap penyusunan kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) :

1) Tahap penyusunan agenda. Tahap penyusunan agenda merupakan tahapan dimana pejabat memilih serta mengangkat dan menempatkan permasalahan pada agenda publik. Banyaknya permasalahan yang harus menjadi perhatian menyebabkan satu permasalahan harus berkompetisi atau bersaing terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Sehingga pada akhirnya, beberapa permasalahan harus masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap penyusunan agenda ini tidak semua masalah menjadi perhatian, sementara permasalahan yang lain akan ditetapkan dan akhirnya menjadi fokus dalam pembahasan. Bahkan harus ada permasalahan yang dikarenakan alasan-alasan tertentu ditunda pembahasannya untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana permasalahan yang telah masuk kedalam agenda penyusunan kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Selanjutnya masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing

alternatif solusi juga harus bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap dimana tersedia sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari berbagai pihak. Semakin banyak pihak yang memberikan dukungan maka peluang untuk mengadopsi suatu kebijakan akan terbuka semakin lebar.

4) Tahap implementasi kebijakan. Tahap ini merupakan tahap yang penting mengingat sebaik apapun sebuah kebijakan tetapi tidak dilaksanakan akan berakibat negatif atau huruk. Bahkan tidak sedikit suatu kebijakan yang hanya menjadi catatan-catatan jika program tersebut tidak diimplementasikan. Keengganan untuk melakukan implementasi atas sebuah kebijakan sangat mungkin terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga pada lembaga-lembaga pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil haruslah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Kewajiban lembaga pemerintah mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak terlepas dari kewenangan pemerintah dalam upaya memobilisasikan setiap sumber daya finansial dan sekaligus sumber daya manusia yang ada. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa kebijakan yang diimplementasikan akan mendapat dukungan dari para pelaksana

(*implementors*) kebijakan itu sendiri, namun ada juga beberapa kebijakan lain yang mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan itu sendiri.

- 5) Tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini sebuah kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi. Penilaian atau evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat memiliki dampak atau akibat. Dampak atau akibat dari sebuah kebijakan seharusnya sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar dari penilaian atas kebijakan itu sendiri. Penilaian atas kebijakan tersebut harus mampu memberikan informasi apakah kebijakan yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Menurut Charles O' Jones dalam Agustino (2006:113) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Diantara ketiga faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah:

- 1) Struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan antara pelaksana kebijakan dengan mereka yang terlibat/ terdampak terhadap kebijakan tersebut.
- 2) Daya tanggap. Daya tanggap akan memberikan informasi bagaimana tanggapan para pelaksana kebijakan terhadap mereka yang terlibat/ terdampak dari kebijakan yang diambil.

- 3) Kepemimpinan. Kepemimpinan memberikan informasi seberapa besar kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah kebijakan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan suatu prosedur untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi. Bukan hanya soal penyaluran aspirasi, namun juga sekaligus adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pemegang kedaulatan. Kesepakatan atau konsensus antar pemegang kedaulatan tersebut terkait erat dengan hal-hal dan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjamin kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara luas. Jadi, kebijakan merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan sebuah proses yang sulit. Meskipun sulit, namun pemerintah sebagai mendataris rakyat haruslah membuat kebijakan karena pembuatan kebijakan merupakan tanggungjawab pemerintah yang telah diberikan oleh rakyat.

“pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*)”.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang perlu diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah bahwa dalam hal pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan. Guna mengurangi atau meminimalisir tingkat kesalahan dalam pembuatan kebijakan, maka perlu memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi proses

pembuatan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan / kebijakan menurut Nigro and Nigro dalam Islamy (1986, 25-26) yang berjudul Prinsip-prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara adalah sebagai berikut :

“a. Adanya pengaruh tekanan dari luar, b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konsevatisme*), c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, d. Adanya pengaruh dari kelompok luar, e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu”.

e. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik merupakan kerangka yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut Suharno (2010:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel. Setidaknya ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kerangka kerja perumusan kebijakan. Ke-enam variabel tersebut adalah:

- 1) Tujuan yang akan dicapai. Semakin banyak tujuan yang ingin dicapai dalam perumusan kebijakan, maka akan semakin sulit dalam mengukur kinerja sebuah kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- 2) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

f. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-ebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang irencanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang

berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

- 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

g. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandang masing-masing. James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur

alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Lebih lanjut Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010: 25-27) mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan. Adapun secara umum tujuan kebijakan tersebut dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

- 1) **Tuntutan kebijakan (*policy demands*)**. Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

- 2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*). Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
- 3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*). ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*). Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.
- 5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*). Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Lebih jauh William N. Dunn (2000: 21) membedakan tipe-tipe kebijakan publik menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) Masalah kebijakan (*policy public*). Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.
- 2) Alternatif kebijakan (*policy alternatives*). Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.
- 3) Tindakan kebijakan (*policy actions*). Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.
- 4) Hasil kebijakan (*policy outcomes*). Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- 5) Hasil guna kebijakan. Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

Jika dilihat secara umum, maka peneliti mengelompokkan kebijakan kedalam beberapa kelompok: 1) kebijakan substantif (misalnya kebijakan perburuan kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri); 2) kelembagaan (misalnya: kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen); 3) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya kebijakan masa reformasi, kebijakan masa orde baru).

h. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn sebagaimana yang dikutip oleh Widodo (2001:192) menguraikan batasan implementasi sebagai;

“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievements of objectives set forth in prior policy decisions. This includes both one time effort to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

Apa yang dikatakan oleh Van Mater dan Van Horn tersebut diatas menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkannya pada usaha untuk mencapai perubahan baik yang

besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Patton dan Sawicki sebagaimana yang dikutip oleh Tangkilisan (2003:9) mengemukakan pengertian implementasi sebagai sebuah cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan sekaligus menerapkan sebuah kebijakan setelah melakukan seleksi:

“Implementasi herkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi”

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:192) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian”.

Dari definisi yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sebatier tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya melihatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri

kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

William N. Dunn (2003:132) mengistilahkan implementasi kebijakan secara lebih khusus dengan menyebutnya menggunakan istilah implementasi kebijakan. Menurut Dunn “implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian terhadap sebuah aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Budi Winarno (2005:101) menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas. Implementasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (*output*) maupun hasil, yang melibatkan banyak aktor, banyak organisasi prosedur dan banyak teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwidjowijoto (2004:158) yang mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Dwijowijoto diatas, tidak lain berkaitan dengan cara bagaimana agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Pengimplementasian melalui berbagai bentuk program-program serta melalui *derivate* kebijakan dianggap lebih efektif. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui program intervensi dan kegiatan intervensi. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2001:193) lebih lanjut menjelaskan lebih rinci terkait dengan proses implementasi kebijakan. Mazmanian mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/ sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/ mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap keputusan tersebut”

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan dasar. Pelaksanaan kebijakan dari kebijakan dasar ini biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang dianggap penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut dibuat untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi. Sehingga apabila telah melalui suatu proses akan dihasilkan suatu output kebijakan dan akan diketahui dampak nyata dan dampak keputusan tersebut bagi kelompok sasaran.

Menurut Darwin dalam Widodo (2001:194) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi kebijakan yang perlu dilakukan. Setidaknya terdapat 5 (lima) hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu “pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik”.

Persiapan proses terhadap implementasi kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan. Persiapan proses tersebut haruslah mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan. Selanjutnya program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan terakhir adalah dengan menyediakan layanan dan manfaat pada publik.

Mengenai keterlibatan berbagai aktor dalam implementasi kebijakan, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986:11) mengemukakan yang artinya adalah sebagai berikut:

“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation front numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.”

Berdasarkan pendapat Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin tersebut, dijelaskan bahwa kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat,

tetapi juga dikarenakan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks. Kompleksitas variabel tersebut baik variabel yang bersifat individual maupun variabel yang bersifat organisasional. Masing-masing variabel memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan dan juga saling berinteraksi antara satu sama lain.

Jones dalam Widodo (2001:194) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan publik, terdapat tiga macam aktivitas, antara lain:

"1). Organisasi; Pembentukan sumber daya, unit, dan metode untuk menempatkan kebijakan berlaku. 2). Interpretasi; Terjemahan bahasa (sering terkandung dalam Undang-Undang) ke dalam rencana yang dapat diterima dan layak dan arahan. Dan 3). Aplikasi; Penyediaan pelayanan rutin, pembayaran, atau menyetujui tujuan atau instrumen".

Berdasarkan pendapat Jones tersebut, setidaknya ada tiga macam aktivitas implementasi kebijakan publik **Pertama**, aktivitas pengorganisasian kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. **Kedua** Aktivitas interpretasi merupakan aktivitas (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. **Ketiga** Aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Berdasarkan berbagai definisi implementasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan dan sasaran kebijaksanaan publik terealisasi sebagai hasil akhir kegiatan pemerintah. Fungsi implementasi tersebut mencakup penciptaan sistem pelaksanaan kebijaksanaan yang merupakan alat khusus yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan khusus.

Dengan demikian kebijaksanaan publik yang pada umumnya masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran dan berbagai macam sarana, diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang semua ini dimasukkan untuk mewujudkan tujuan atau sasaran yang dinyatakan dalam kebijaksanaan. Implementasi adalah upaya mewujudkan kebijaksanaan menuju hasil yang diinginkan.

Untuk melihat apakah suatu implementasi tersebut dapat dikatakan gagal atau berhasil maka perlu diuraikan mengenai ukuran-ukuran dalam implementasi kebijaksanaan. Menurut Rue dan Byars dalam Keban (1995:1) mengatakan bahwa "Implementasi pada hakekatnya merupakan kinerja atau tingkat pencapaian hasil (*the degree of accomplishment*). Atau dengan kata lain, merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi".

Ripley dan Franklin memberikan catatan bahwa ada beberapa cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi. Ripley dan Franklin (1986:11) menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini;

“...the five most important features discussed in remainder of this chapter: the profusion of actors, the multiplicity and vagueness of goals, the proliferation and complexity of government programs, the participation of governmental units at all territorial levels, and the uncontrollable factors that all affect implementation....”.

Apa yang dikatakan oleh Ripley dan Franklin tersebut diatas menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) indikator dalam menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan. Ke-lima indikator tersebut adalah: banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kompleksitas program pemerintah, partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi.

2. Manajemen Strategi

a. Pengertian Strategi

Pengertian strategi ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dalam buku karya mereka masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Menurut Marrus (2002:31) strategi didefinisikan sebagai “suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai”.

Selanjutnya Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah “suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi

menjadi suatu kesatuan yang utuh”. Apa yang dikatakan oleh Quinn tersebut memiliki makna bahwa strategi harus diformulasikan dengan baik. Semakin baik formulasi strategi maka akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan. Strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan organisasi. Dalam menyusun strategi juga harus melakukan antisipasi terhadap adanya perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh.

Dari kedua pendapat di atas, maka strategi dapat diartikan sebagai suatu rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan strategi meliputi : tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi.

Setiap perusahaan atau organisasi, khususnya yang bergerak dibidang jasa harus memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi penagganya. Oleh karena itu, setiap strategi perusahaan atau organisasi harus diarahkan bagi konsumen atau pelanggan. Hal ini seperti yang dijelaskan Hamel dan Prahalad (1995:31) yang mengatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan berlangsung secara terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para publik di masadepan”.

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Goldworthy dan Ashley

(1996:98) mengusulkan tujuh aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :

“1. Ia harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya masa sekarang. 2. Arah strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan. 4. Ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. 5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal. 6. Fleksibilitas adalah sangat esensial. 7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang”.

Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada para pelangganya. Selain itu, strategi juga harus mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak maupun oleh setiap karyawan dari organisasi. Donelly (1996:109) mengemukakan ada 6 (enam) informasi yang tidak boleh dilupakan dalam strategi, yaitu :

“1. Apa yang akan dilaksanakan, 2. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa yang menjadi prioritas, 3. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau mengoperasionalkan strategi, 4. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi, 5. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut, dan 6. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut”.

Untuk menjamin agar strategi dapat berhasil dengan baik, maka pimpinan harus mampu meyakinkan agar orang lain dapat mempercayai. Selain itu pimpinan harus mampu meyakinkan bahwa orang lain dapat melaksanakannya. Untuk itu Hatten dan Hatten (1996: 108-109) memberikan beberapa petunjuk bagaimana strategi dapat berjalan efektif. Diantara petunjuk tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

“1.Strategi harus konsisten dengan lingkungan, strategi dibuat mengikuti arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang memberi peluang untuk bergerak maju, 2.Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi, tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila ada banyak strategi yang dibuat maka strategi yang satu haruslah konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakan, semua strategi senantiasa

diserasikan satu dengan yang lain. 3.Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumberdaya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam suatu organisasi seringkali mengklaim sumberdayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan-kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi, 4.Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan memhual langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat, 5.Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi adalah sesuatu yang mungkin, hendaknya dibuat sesuatu yang memang layak dapat dilaksanakan, 6.Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Memang setiap strategi mengandung resiko, tetapi haruslah berhati-hati, sehingga tidak menjerumuskan organisasi ke lubang yang lebih besar. Oleh karena itu strategi hendaknya selalu dapat dikontrol, 7.Strategi hendaknya disusn diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai, 8.Tanda-tanda suksesnya dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit dalam organisasi”.

Sementara itu menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner seperti yang dikutip dalam Rangkuti (1998:4) menyatakan bahwa “strategi merupakan respon secara terus-mencrus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi”. Apa yang dikatakan oleh Argyris dkk tersebut menjelaskan bahwa dalam menyusun stretegi harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam internal organisasi.

Lebih lanjut Bryson (2001:189-190) mcnjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai “pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya”.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan datang. Selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Strategi secara umum akan gagal apabila organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan. Ketidak konsitenan inilah yang menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing anggotanya.

b. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen. Secara terperinci Grant menjelaskan ada 3 (tiga) fungsi strategi yaitu :

- 1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi merupakan

suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.

- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Salah satu peranan penting strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi adalah untuk memberikan kesamaan arah bagi organisasi.
- 3) Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana organisasi berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi, tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi organisasi. Dengan demikian, strategi juga dapat berperan sebagai target organisasi.

c. Kriteria Kinerja Organisasi

Kebutuhan akan ukuran dari kinerja organisasi pelayanan publik sangat diperlukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan organisasi, terutama bagi pimpinan organisasi publik maupun pengguna jasa. Penilaian terhadap kinerja bagi suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam periode tertentu. Penilaian tersebut dapat dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan pelayanan suatu organisasi selanjutnya.

Kinerja organisasi menurut Warsito Utomo (2000:9) dikonsepsikan sebagai “tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan”. Pengukuran kinerja pelayanan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran kinerja pelayanan yang menurut Zeithml,

Parasuraman dan Berry (1990:21-22) terdiri dari sepuluh indikator pelayanan antara lain:

“1.Kenampakan fisik (*tangibles*); penampilan fasilitas secara fisik, perlengkapan, pegawai, dan peralatan komunikasi, 2.Realibilitas (*reability*); kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat, 3.Responsivitas (*responsiveness*); kerelaan untuk menolong publik dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas, 4.Keahlian (*competence*); menekankan kecakapan dan pengetahuan dalam menyelenggarakan pelayanan, 5.Kesopanan (*courtesy*); sopan, hormat, penuh pertimbangan, dan ramah, 6.Kredibilitas (*credibility*); menghargai kepercayaan publik, dapat dipercaya, kejujuran yang ada pada penyedia pelayanan, 7.Keamanan (*security*); pelayanan bebas dari bahaya, risiko, atau kesanksian, 8.Komunikasi (*communication*); memberi informasi kepada publik dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mendengar apa yang diharapkannya, 9.Akses (*access*); kedekatana dan kemudahan dalam hubungannya antara publik dengan organisasi, 10.Pengertian terhadap publik (*understanding the customer*); membuat upaya untuk mengetahui apa yang diinginkan publik”.

Indikator kinerja menurut Mc. Donald dan Lawton dalam Yeremias (2004:203) dikemukakan sebagai berikut: “bahwa kinerja dapat diukur dari output orientasi *measure throughput* (ukuran yang berorientasi pada hasil bukan proses), *efeciency* (efisiensi), *effektiveness* (efektivitas)”. Sedangkan menurut Salim dan Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain: “*work load* atau *demand* (permintaan), *economy efficiency* (efisiensi ekonomi), *effektiveness* (efektivitas), and *equity* (keadilan)”.

Lebih lanjut Atmosoeprapto dalam Hessel Nogi (2005:181) mengemukakan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Lebih lanjut Nogi menjelaskan secara lebih rinci kedua faktor tersebut sebagaimana yang diuraikan berikut:

“a. Faktor eksternal, yang terdiri dari: 1. Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya secara maksimal. 2. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system ekonomi yang lebih besar. 3. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. b. Faktor internal, yang terdiri dari; 1. Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi. 2. Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 3. Sumber Daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. 4. Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan”.

3. Konsepsi tentang Wilayah Perbatasan Negara

Negara merupakan sebuah tatanan hukum, maka segala masalah yang timbul dalam teori umum tentang negara harus dapat diterjemahkan ke dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori umum tentang negara. Doktrin tradisional membedakan tiga “unsur” negara: teritorialnya, rakyatnya, dan kekuasaannya. Sehingga yang dianggap sebagai esensi suatu negara ialah bahwa negara itu mempunyai suatu teritorial dengan batas-batas tertentu (Kelsen, 2006).

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari

jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut (Hanita,2008).

Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara (Hanita,2008).

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis) (Hadiwijoyo,2009).

Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (cultural landscape) dari negara- negara yang dipisah. Menurut Harsthorne (dalam Hadiwijoyo.2009) 7 klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

- 1) *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.
- 2) *Subsequent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya cultural landscape dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama.
- 3) *Superimposed boundaries*, yaitu jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *subsequent boundaries* namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.
- 4) *Relic boundaries*, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang hudayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain.

Klasifikasi morfologis adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan morfologinya perbatasan dapat dibedakan menjadi dua tipe (Harsthorne dalam Hadiwijoyo, 2009), yaitu:

- 1) Artificial boundaries, yaitu perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia.
- 2) Natural boundaries, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah.

Beberapa ahli Hukum Internasional seperti Green Maryan, Shaw Malcolm, J.G. Starke dan Burhan Tsani berpendapat bahwa wilayah perbatasan adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut maupun udara yang dapat dikualifikasi dalam terminologi "*border zone*" (zona perbatasan) maupun "*customs free zone*" (zona bebas kepabeanan). Wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional yang bersifat "*treaty contract*" untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat "*law making treaty*" untuk pengaturan masalah perbatasan secara permanen berkelanjutan (Seran, 2012).

Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya. Perbatasan negara pada hakekatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Khususnya perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (misalnya gunung, sungai atau laut) dan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner (Samekto, 2009).

Oscar J. Martinez (Darnaputra, 2009) mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu:

- 1) **Alienated borderland**: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- 2) **Coexistent borderland**: suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.
- 3) **Interdependent borderland**: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
- 4) **Integrated borderland**: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Negara Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17/1985. Dengan mengacu pada acuan hukum ini beberapa pranata perbatasan laut nasional akan

dituntaskan. Berikut diberikan sekadar gambaran capaian penetapan batas laut Indonesia untuk beberapa pranata hukum laut yaitu, Batas Laut Teritorial (BLT), batas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landasan Kontinen (BLK), Batas Laut Teritorial (BLT) Indonesia yang selebar 12 mil laut dari garis pangkal sebagian besar sudah disepakati dengan negara lain, kecuali dengan Timor Leste. Dengan negara yang baru merdeka ini masih harus ditentukan garis-garis pangkal kepulauan di Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, Pantar hingga pulau Vatek dan titik dasar sekutu di Pulau Timor. Di samping itu, Indonesia harus merampungkan perundingan tiga pihak (*tripartit*) dengan Singapura dan Malaysia untuk menyepakati BLT di Selat Singapura bagian barat dan timur yang lebarnya kurang dari 24 mil serta bersinggungan dengan perbatasan tiga negara.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mengacu pada Undang-undang Nomor 17/1985 Indonesia tidak menghadapi kesulitan menetapkan batas ZEE itu ke wilayah laut bebas. Yaitu hanya dengan menarik garis pangkal sejauh 200 mil ke laut bebas tersebut. Namun untuk batas laut yang berhadapan dengan wilayah negara-negara tetangga dengan jarak yang kurang dari 400 mil dari garis pangkal masing-masing harus ditetapkan lewat perundingan bilateral. Artinya untuk penetapan batas laut ZEE itu Indonesia masih harus menetapkan batas pada wilayah laut yang: (a) Berhadapan dengan Malaysia dan Singapura di selat malaka (b) Berhadapan dengan Malaysia di laut natuna sebelah barat dan timur (c) Berhadapan dengan Vietnam di laut Cina selatan sebelah utara (Salindeho & Sombowadlir, 2008),

Batas laut kontinen (BLK) mengacu pada Undang-undang Nomor 1/1973 tentang batas landas kontinen Indonesia serta kepulauan Indonesia. Hal itu berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen segmen wilayah tertentu yang memerlukan kesepakatan khusus dengan negara tetangga, yaitu (a) Berhadapan dengan India dan Thailand di laut Andaman (b) Berhadapan dengan Thailand di selat malaka bagian utara (c) Berhadapan dengan Malaysia di selat Malabagian selatan serta dilaut natuna bagian timur dan barat (d) Berhadapan dengan Vietnam di laut Cina Selatan (e) berhadapan dengan Filipina di laut Sulawesi (f) berhadapan dengan pulau di samudra pasifik (g) berhadapan dengan Australia di laut arafura, laut timor, samudra Hindia dan wilayah perairan di sekitar pulau Christmas (h) Berhadapan dengan Timor Leste di laut timor (Salindeho & Sombowadlir, 2008).

Selain itu juga terdapat titik-titik BLK yang titik batasnya harus ditentukan bersama oleh tiga negara sekaligus (*three junctionpoint*), yaitu: *Three junction point* di laut andaman antara Indonesia, India dan Thailand dan *three junction point* di selat malaka bagian utara antara Indonesia, Thailand dan Malaysia. Kini sebagian BLK dengan negara tetangga sudah disepakati dan dikukuhkan dalam produk hukum nasional. Namun beberapa masalah dalam proses negosiasi antara lain dengan Filipina, Vietnam, Palau dan Timor Leste (Rudy, 2006).

4. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan adalah terjemahan dari kata "*Souvereiniteit*" yang asal katanya superanur atau superanitas yang berarti kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi di dalam suatu wilayah. Teori-teori kedaulatan setidaknya

terdapat empat teori kedaulatan yaitu (1) kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dalam paham ini bisa dimengerti jika kemudian ternyata pemerintah sering bertindak atas nama Tuhan tak bisa diganggu gugat. Implikasi dari teori ini adalah adanya negara-negara teokrasi (2) kedaulatan rakyat demokrasi yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah harus berpijak pada keinginan rakyat (demos = rakyat, krator = pemerintah). J.J. Rousseau mengemukakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi ini adalah melalui “perjanjian masyarakat” (*social contract*) yang berkonsekuensi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dapat dimazulkan (dijatuhkan) oleh rakyatnya. (3) kedaulatan negara yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa negara berdaulat karena ada negara. Jadi sumber kedaulatan adalah negara itu sendiri. Karena ada negara maka ada kekuasaan yang diperoleh oleh pemerintah dari negara itu. Otto Mayer, seorang Jerman mengatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan adalah menurut kehendak alam karena adanya negara itu. Kedaulatan ini tidak diperoleh dari siapa pun juga melainkan diperoleh secara alamiah karena ada negara. Pemerintah berkuasa sebagai alat negara. (4) kedaulatan hukum yaitu teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu bersumber dari aturan hukum (supremasi hukum).

Keempat teori ini herangkat dari gagasan dan realitas, artinya keempat teori ini bisa dilihat dalam realita ketatanegaraan diberbagai

belahan dunia. Bahkan di Indonesia, menurut Wirjono Prodjodikoro keempat teori ini bisa diakui sama. Tetapi yang jelas adalah tidak ada satupun dari keempat teori itu yang mempunyai kebenaran mutlak karena pada akhirnya, teori yang manapun, bisa disalah gunakan. Yang penting sebenarnya adalah semangat para penyelenggara serta moral kekuasaan yang melandasinya (Mahfud MD, 2001).

Dalam membahas persoalan kedaulatan suatu negara biasanya akan berhubungan langsung dengan suatu analisis tentang mata rantai, yang terdiri dari aspek-aspek politik, hukum, dan ekonomi. Dari sisi ini, aspek politik dan ekonomilah yang akan selalu menonjol. Aspek hukum, terutama sekali hukum udara khususnya di negara kita, posisinya jauh tertinggal. Padahal dalam menyongsong masa depan yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dirgantara, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan banyak berhadapan dengan masalah hukum udara. Pengaruh dari hukum Romawi tentang hak kepemilikan di udara terdapat di dalam hukum Indonesia, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 571, yang berbunyi, "Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, kepemilikan atas segala yang ada di atasnya dan di dalam tanah" (Mauna, 2005).

Mengacu kepada hal ini, tentu dapat diartikan, dalam konteks yang lebih besar, dalam hal ini negara, maka daerah kedaulatan negara akan termasuk di dalamnya kedaulatan negara di udara. Perangkat negara yang ditugaskan untuk menjaga kedaulatan negara di udara adalah angkatan udara, dalam hal ini TNI Angkatan Udara.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, yaitu tahun 1944, telah terbentuk Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 Desember 1944. Dalam Pasal I juga disebutkan bahwa “Setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya”. Selanjutnya disebutkan juga bahwa “hak lintas damai” di ruang udara nasional suatu negara, seperti halnya pada hukum laut, ditiadakan. Jadi tidak satu pun pesawat udara asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai (Salindeho & Sombowadilr, 2008).

5. Penyelundupan Barang

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang dimuat dalam *the New Grolier Webster International Of English Languange* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law without payment of legally required duties*” yang dalam terjemahannya adalah “mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah (Lopa,1992).

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan

barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu (Hamzah,1985).

Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk menghindari bea cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata api, amunisi, dan sejenisnya, narkoba (faktor keamanan) dan lain-lain. Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) (Hamzah,1985).

Dalam *Law Dictionary* (Chibro,1992) Secara umum jenis-jenis penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut : Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajaktau Bea Cukai. Dari pengertian penyelundupan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakekat dari penyelundupan adalah untuk menghindari bea masuk atau bea keluar, supaya mendapatkan keuntungan yang besar.

Pengertian tindak pidana penyelundupan dalam kamus bahasa Indonesia adalah kata “tindak” yang artinya langkah dan perbuatan. Kata “pidana” yang artinya kejahatan. Sedangkan kata “penyelundupan” yang kata dasarnya adalah “seludup” artinya menyuruk, masuk dengan

diam-diam, menukik dan menyelip. Jadi kata “penyelundupan” adalah proses, cara, perbuatan menyelundup.

Secara umum, menurut Prakoso dkk (1987) jenis-jenis penyelundupan dapat dibagi dalam dua jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri.
- 2) Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.

Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan cara diam-diam atau menyelip, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

6. Konsep kebijakan bidang hukum, keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur dalam pengelolaan wilayah perbatasan

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen pemerintahan, baik dalam arti *government* yang menyangkut aparatur negara, maupun pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan ini erat kaitannya dengan kebijakan publik. Thomas R. Dye berpandangan bahwa Kebijakan publik merupakan tindakan yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah, memiliki pokok kajian berupa negara. Kebijakan publik selalu di tindak lanjuti dengan proses implementasi kebijakan. Seperti halnya kebijakan pembangunan yang telah terimplementasi ke dalam sebuah negara sebagai sebuah kebijakan yang telah terbentuk dan siap untuk dijalankan (Setiawan,2013).

Kebijakan pembangunan di negara-negara sedang berkembang dan belum berkembang mungkin saja sudah relatif baik, namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan atau bahkan belum bisa dijalankan, termasuk seperti yang terjadi di Indonesia (Setiawan,2013). Peran kebijakan pembangunan ini kian penting di kawasan perbatasan sebagai upaya menjaga kedaulatan negara. Dalam upaya pengelolaan wilayah perbatasan di Kepulauan Riau, setidaknya ada empat permasalahan

yang menjadi fokus kebijakan dalam mengefektifkan pengelolaan wilayah perbatasan yakni kebijakan dalam bidang hukum, keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang berlaku saat ini, setidaknya terdapat dua belas peraturan perundang-undangan yang terdiri dari enam undang-undang, empat Peraturan Presiden, dan dua Peraturan Pemerintah. Namun undang-undang yang dipandang lebih spesifik mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedangkan pengaturan terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pelaksanaannya terutama dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008.

Salah satu tindakan signifikan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan ini mengoordinasi 18 kementerian dan lembaga negara untuk membangun kawasan perbatasan.

Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini sebagai amanat dari UU Wilayah Negara dengan dasar hukum Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kedudukan, tugas dan fungsi BNPP diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. BNPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, ber tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran,

mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. BNPP menyelenggarakan tujuh fungsi yang meliputi: (1) penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (2) pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (3) pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; (4) inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (5) penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; (6) penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan (7) pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Berkaitan dengan pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan, Ketentuan Pasal 11 ayat (4) mengatur kewenangan pada BNPP melalui Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan yang mempunyai 4 tugas yaitu: (1) melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan; (2) mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; (3) mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; (4) melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran keuangan (Mardiasmo, 2009). Permasalahan keuangan terkait dengan minimnya dukungan anggaran bagi pengamanan perbatasan secara efektif menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas dilapangan menjadi rendah. Kurangnya dukungan dan perhatian dari Pemda setempat juga menjadi masalah yang melemahkan pengamanan perbatasan (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2003).

Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun daerah. Padahal, sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Halim, 2007).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- 4) Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja.
- 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Agar dapat memenuhi fungsi-fungsi tersebut, seluruh pimpinan dan para stafnya harus memiliki kualifikasi yang memadai dan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pola pikir yang mendukung penerapan anggaran yang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengkomunikasikan harapan pimpinan kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.

Pengamanan pada wilayah perbatasan negara dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu. Belum maksimalnya pengelolaan pengamanan perbatasan disinyalir karena penganggaran terkait dengan hal tersebut masih

bersifat sektoral. Dalam konteks ini sesungguhnya keberadaan sejumlah personil dari berbeda instansi akan lebih efektif apabila penganggarannya disatukan pada satu pos yang mana mencakup instansi-instansi tersebut dalam keterpaduan irama yang sama dalam pengamanan perbatasan. Konsekuensi dari itu adalah merealisasikan terbentuknya suatu badan atau lembaga pengamanan daerah perbatasan secara terpadu, dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan (Muradi,2016).

Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah perbatasan agar dapat serasi dengan perkembangan saat ini perlu dilihat potensi wilayah yang ada. Potensi tersebut adalah sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup masyarakat setempat. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya (*resources*) baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Namun untuk mendukung suatu pembangunan, SDM adalah yang terpenting.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Menurut Susilo (2002:3) “sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya”. “Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan”,

sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich (Mathis dan Jackson,2002:4). Maka dari itu, Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan,2003:15).

Hasibuan (2001:244) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki individu. Sumber daya manusia dipandang sebagai kemampuan yang dimiliki manusia untuk didayagunakan untuk menjalankan suatu organisasi atau urusan sehingga berdayaguna atau berhasilguna. Sedangkan menurut Almasdi (2006:17) sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan karya manusia yang masih tersimpan di dalam dirinya yang perlu dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Di wilayah perbatasan masih ditemukan kualitas SDM yang rendah dan sebarannya tidak merata. Wilayah geografi terutama lautan sebenarnya memberikan peluang peran Indonesia sebagai pengawas lalu lintas internasional (Pokja Tannas, 2010) sekaligus sebagai produsen komoditi berbasis kelautan. Namun hal ini tidak dapat dimanfaatkan karena kualitas SDM belum memadai dalam penguasaan teknologi berbasis maritim dan kelautan. Rendahnya kualitas SDM tersebut dapat berakibat kepada menurunnya rasa kebangsaan.

Menurut Hasan, (dalam Jusmaliani 2011:100) untuk memajukan kualitas sumber daya insani ada tiga dimensi yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Dimensi Kepribadian. Dimensi kepribadian menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas.
- 2) Dimensi Produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
- 3) Dimensi Kreativitas. Dimensi ini menyangkut pada kemampuan seseorang untuk berpikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

Berkaitan dengan infrastruktur, dukungan yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung lainnya menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2003).

Hapsari (2011) bidang Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula kerangka kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air, pengumpulan sampah dan limbah, pengolahan dan pembuangannya, sistem keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, sistem transportasi dan utilitas publik. Selanjutnya, infrastruktur dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan

peruntukannya. Infrastruktur dapat dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Infrastruktur ekonomi diantaranya utilitas publik seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalur kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara. Infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Konsep infrastruktur pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Prinsipnya ada dua jenis infrastruktur, yakni infrastruktur pusat dan daerah. Infrastruktur pusat dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional, seperti jalan raya antar propinsi, pelabuhan laut dan udara, jaringan listrik, jaringan gas, telekomunikasi dan sebagainya. Infrastruktur daerah dibangun pemerintah daerah, seperti penyediaan air bersih, jalan khas untuk kepentingan daerah pariwisata dan sebagainya.

7. Strategi Pengelolaan Daerah Perbatasan

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Selain itu, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak

berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Untuk itu pemerintah mengelola kawasan perbatasan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tanggal 28 Januari 2010 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPP. Ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang mengamatkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah nasional dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Namun, untuk Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih belum memiliki Badan Pengelola Daerah Perbatasan sehingga permasalahan daerah perbatasan untuk wilayah Kepulauan Riau ditangani oleh SKPD terkait.

Menurut *Partnership Policy Paper* (2011) untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sektor dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu:

1. Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.
3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.
5. Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.
6. Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.
7. Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan (*Partnership Policy Paper*, 2011), antara lain:

1. Merealisasikan program-program pembangunan wilayah perbatasan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan koordinasi teknis antar sector
2. Meningkatkan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan hasil hutan dan sumber daya alam lainnya di wilayah perbatasan

3. Peningkatan dan perluasan (ekstensifikasi) areal budi daya pertanian secara luas pada lahan-lahan potensial dengan memperhatikan prinsip dan kaidah konservasi lahan dalam rangka menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian
4. Pembangunan prasarana transportasi wilayah jalan darat dan pelabuhan laut di pusat-pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan
6. Pembangunan pusat pertanian
7. Membangun dan meningkatkan SDM di bidang pertahanan dan keamanan
8. Transmigrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah yang akan dikembangkan
9. Mengembangkan pusat perindustrian
10. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, baik sarana, prasarana dan sumber daya manusianya
11. Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga
12. Menumbuhkan industri pariwisata.

Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan negara

Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Selanjutnya, menurut RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus pengembangan kawasan perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, terdapat salah satu misi yang didalamnya terdapat strategi pengelolaan Provinsi Kepulauan Riau yakni pada misi “Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah

serta meningkatkan ketahanan pangan.” Selanjutnya, untuk melihat keterkaitan strategi dan kebijakan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan
Sasaran RPJMD 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah serta meningkatkan ketahanan pangan.	Meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatnya pembangunan wilayah perbatasan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembangunan wilayah perbatasan	Peningkatan Pengembangan wilayah perbatasan diprioritaskan pada sektor ekonomi, infrastruktu, SDM, dan pelayanan sosial dasar

B. Penelitian Terdahulu

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu diperlukan untuk memperdalam dan sekaligus melihat pola-pola penelitian yang memiliki fokus kajian serupa. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan akan lebih bermakna dan lebih mendalam.

1. Muh. Syaiful K dalam penelitian yang berjudul “Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang. Ditemukan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu bahwa upaya mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan negara, merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Pemerintah seharusnya menindak dengan tegas setiap bentuk pelanggaran di bidang ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu *Staatsblads* No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut disempurnakan melalui UU No. 7 tahun 1955 jo UU No. 8 tahun 1958, UU No. 10 tahun 1995 dan terakhir UU No. 17 tahun 2006. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yaitu di Polrestabes Pare-pare dan Bea Cukai Pare-pare dengan melakukan wawancara dengan petugas di kedua institusi tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, dan sumber yang

berhubungan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Barang. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare) sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh terhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena para petugas dalam menghadapi hujukan dan rayuan masih terpengaruh dengan oknum-oknum penyelundup, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup sehingga sanksi pidana tidak secara langsung dirasakan oleh penyelundup. Sedangkan yang ada di Bea Cukai, tindak pidana penyelundupan barang di Kota Pare-pare disebabkan karena penegak hukum dan penyelundup hanya menyelesaikan di luar pengadilan. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Pelayanan Bea Cukai Pare-pare lebih meningkatkan intensitas Patroli di wilayah perairan pare-pare dan sekitarnya serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengingat hal tersebut sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia dari sektor penerimaan pajak dan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

2. Muhammad Zaenuddin, Didi Istardi, dan Muslim Ansori sebelumnya juga sudah pernah melakukan penelitian dan dipublikasi melalui jurnal dengan judul “Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam”. Berdasarkan jurnal tersebut terungkap bahwa salah satu efek ditetapkannya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas adalah berkembangnya bisnis gelap (*illegal trading*). Bahkan menurut peneliti kegiatan ilegal yang terjadi di Batam sangat variatif. Hasil

pengamatan selama 2 tahun melakukan penelitian ditemukan bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah kegiatan penyelundupan sebanyak 59,18%, Narkotika 16,3%, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia ilegal 6,12%, *money laundry* 5,1%, kegiatan ilegal lainnya 5,1%, pembuangan limbah 3,06%, *trafficking* 2,04%, *illegal trading* 2,04%, dan *illegal logging* 1,02%. Untuk kegiatan penyelundupan, jenis barang yang paling sering diselundupkan adalah mobil 25,86%, BBM 15,52%, elektronik seperti HP dan laptop (15,52%), makanan, minuman dan rokok 13,79%, barang bekas (balpres) 12,07%, barang-barang lain 10,34%, dan minuman keras 6,9%. Sedangkan tempat yang frekuensinya paling sering ditemukannya kegiatan ilegal atau barang ilegal adalah pelabuhan resmi yaitu sebanyak 31%. Kemudian disusul perairan Batam 26,97%, pelabuhan tak resmi 18,18%, tempat lainnya 13%, tidak disebutkan secara spesifik 10,4%, dan bandara 1,3%. Dari aktifitas ilegal tersebut maka potensi kerugian negara sekitar 212,5 milyar rupiah. Selanjutnya instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kegiatan ilegal di Batam antara lain kepolisian 46,32%, bea cukai 32,63%, Lanal Batam 8,42%, instansi lain 8,4%, imigrasi 3,16%, dan Otorita Batam 1,05%.

3. Penelitian Mariya Polner dengan judul *Coordinated border management: from theory to practice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perbatasan dilihat dari arus keluar masuk barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengembangkan kolaborasi antar negara dalam melakukan pengawasan keluar/masuknya barang. Mereka membentuk CBM (*Coordinated Border Management*) yang bertugas melakukan pengawasan

barang secara bergantian. Lebih lanjut menurutnya bahwa di era globalisasi seperti saat ini integrasi merupakan dinamika kunci yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan pembuatan CBM secara bersama-sama maka akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari peraturan yang telah dibuat guna menunjang kebijakan dan kegiatan operasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Penelitian Indra Pahlevi yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul *Pengelolaan Pemerintahan di Wilayah Perbatasan*. Indra merupakan peneliti Masalah Politik dan Pemerintahan Indonesia di Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR RI. Penelitian ini mengambil lokus di Morotai dan Raja Ampat dimana sebagai wilayah perbatasan peran BNPP cukup strategis. Pada bagian akhir ia menyimpulkan tentang beberapa hal terkait dengan perbatasan. Diantara simpulan yang disampaikan oleh Indra adalah; 1). Wilayah perbatasan merupakan “beranda depan” dan bukan “halaman belakang”, sehingga negara (Pemerintah) harus benar-benar mengelola wilayah tersebut dengan sangat serius dan tidak justru menjadi “arena politis” tanpa adanya upaya dan bukti nyata memajukan wilayah dan masyarakatnya. 2). Keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri dan beranggotakan sejumlah menteri lainnya, seharusnya menjadi sebuah solusi yang jitu. Dalam fakta empiris, ternyata masih sulitnya mengkoordinasikan perencanaan dan program pembangunan wilayah perbatasan antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi mubadzir adanya grand design pengelolaan perbatasan jika tidak ada kesamaan pandangan dan

- hanya memikirkan ego sektoralnya masing-masing. Hasilnya adalah belum terlaksannya berbagai program di lapangan termasuk di Morotai dan Raja Ampat sebagai salah satu lokasi prioritas pembangunan. 3). Manajemen pemerintahan harus menjadi dasar dalam mengelola wilayah perbatasan. Selain asas desentralisasi yang dimiliki oleh setiap daerah, manajemen pemerintahan wirausaha harus menjadi salah satu pilihan utama dalam menyelenggarakan pembangunan di setiap daerah dan didukung oleh perencanaan serta koordinasi dengan pemerintah pusat. 4). Kondisi di Pulau Morotai dan Raja Ampat, secara umum belum menunjukkan adanya dampak dari sebuah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Meskipun sudah terdapat beberapa kebijakan, perencanaan, serta program dari berbagai kementerian/lembaga, namun rakyat setempat belum benar-benar merasakan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya sebelum pemekaran (pembentukan sebagai daerah otonomi baru) serta belum optimalnya pembangunan baik fisik maupun non fisik
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pimupsorn Boriboonrat dari Mahidol University Thailand. Ia melakukan riset dengan maksud untuk mempelajari karakteristik dari permasalahan yang menjadi kendala bagi pengelolaan lintas perbatasan di sepanjang pos pemeriksaan perbatasan antara Thailand dan tetangganya negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan *land border* dan Pos pemeriksaan di Thailand terdiri dari lima isu yaitu isu kebijakan, proses, orang yang kurang sumber daya pengelolaan, database dan teknologi informasi, dan pengembangan infrastruktur.

6. Penelitian oleh Zulkifli, Latif, dan Karmilia tentang resiko pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan model kerja sama ekonomi internasional. Hasil penelitian menemukan adanya beberapa risiko dalam pengelolaan kawasan perbatasan, seperti kesulitan dan kurang memadainya akses darat dan laut menuju ke kawasan ini perbatasan, serta sarana komunikasi sangat terbatas maka orientasi masyarakat cenderung ke negara tetangga menjadi tugas berat pemerintah yang harus diselesaikan, karena kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap para penyelundup barang, penjualan manusia (trafficking person), pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita) menjadi resiko tersendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui kerjasama ekonomi internasional. Di tambah lagi pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu dari negara tetangga ini juga berdampak berupa ditarik-nya sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut.
7. Penelitian oleh Sunandar (2012) mengenai penanggulangan peredaran gula ilegal di luar kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak oleh kepolisian daerah Kalimantan Barat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kendala yuridis dan teknis yang dihadapi Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kasus peredaran gula ilegal dari Sarawak Malaysia Timur, berkorelasi dengan faktor belum terciptanya sistem peradilan pidana terpadu dalam proses penyidikan gula ilegal dan belum

memadainya profesionalitas manajemen penyidikan Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat. Selanjutnya upaya Polda Kalimantan Barat dalam menanggulangi kecenderungan meningkatnya perdagangan lintas batas ilegal di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak adalah dengan melakukan revitalisasi kemampuan penyidik, pemuliaan profesi, implementasi komitmen profesi, dan peningkatan kinerja penyidik Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Barat.

8. Penelitian Muhammad mengenai kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia: kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Muhammad mengatakan bahwa penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia. Maraknya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan wilayah Malaysia menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dari aparat yang melakukan pengawasan di pos-pos pemeriksaan lintas batas, selain keterbatasan teknologi untuk mendeteksi barang yang diduga narkoba, jika penyelundupan dilakukan melalui jalur resmi (baik bandara maupun pelabuhan). Keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus di Kepri dan jalan-jalan tikus di Kalbar sebagai pintu masuk tidak resmi dari Malaysia ke Indonesia juga semakin membuka peluang bagi terjadinya penyelundupan narkoba melalui kawasan perbatasan.
9. Penelitian Adji Suradji Muhammad (2018) mengenai Collaborative Governance dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan

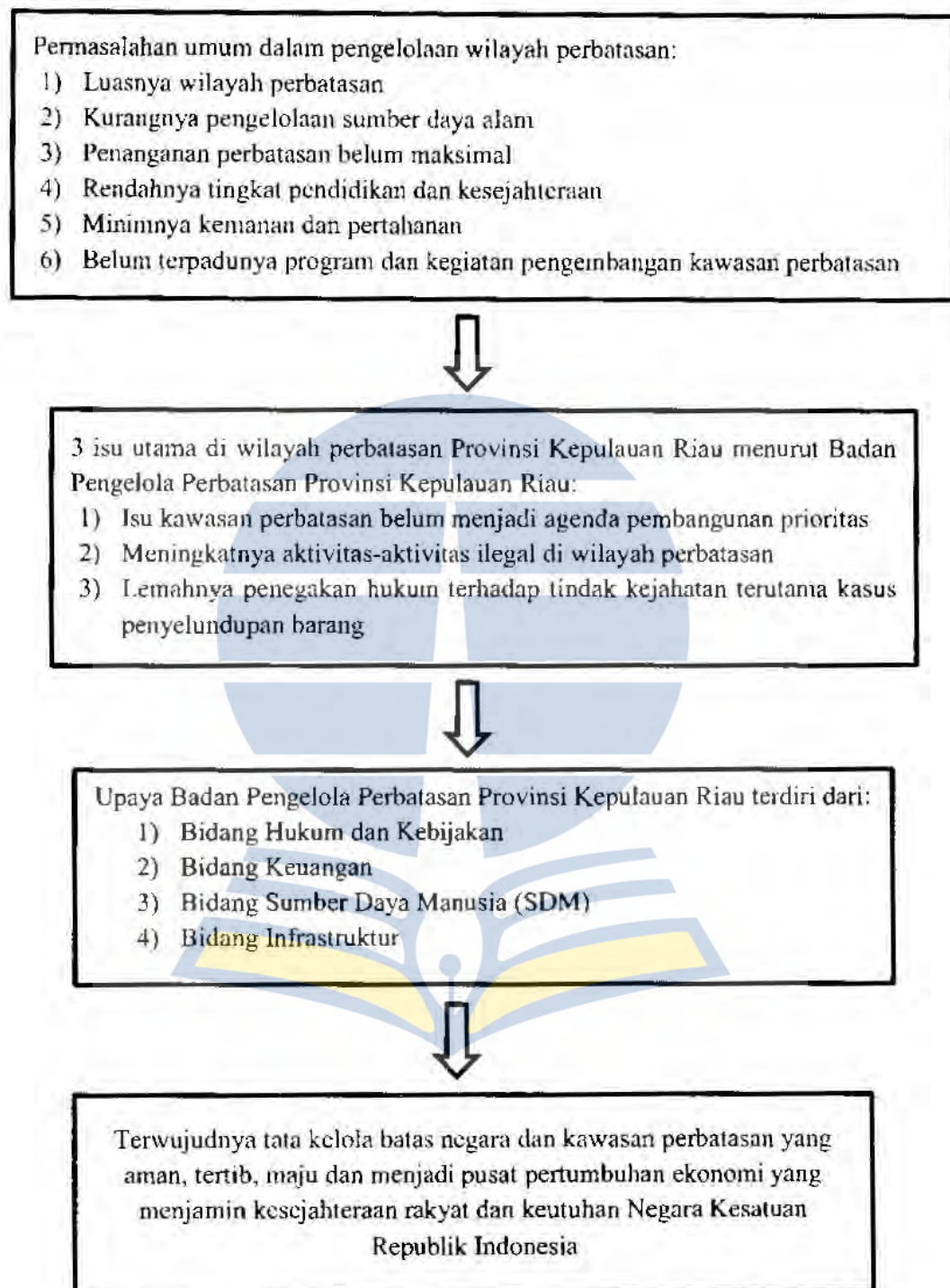
Riau. Muhammad menemukan bahwa meskipun dalam pengelolaan perbatasan terdapat banyak intitusi baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, namun berbagai institusi tersebut gagal atau belum berhasil dalam mengelola kawasan perbatasan. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kurangnya komitmen antar pihak, kurangnya kepercayaan antar pihak, keterbatasan akses terhadap informasi, dan kurangnya koordinasi. Beberapa hal tersebut diatas terbukti menjadi factor penyebab gagalnya kolaborasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau.

Berdasarkan kelima penelitian diatas maka letak perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu secara substansi adalah bahwa penelitian yang peneliti lakukan penekanannya berada pada strategi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan negara.

C. Kerangka Berfikir

Guna memberikan gambaran alur pemikiran dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Untuk menunjang penulisan tesis ini, harus diperhatikan jenis penelitian apa yang sebaiknya digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data apa yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Prasetya Irawan (2006:4-5) penelitian kualitatif disebut juga sebagai *verstehen* (pemahaman mendalam). Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif adalah mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Penelitian kualitatif disebut juga *Participant-Observation*, hal ini karena peneliti sendiri yang harus menjadi instrument utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya.

Penelitian kualitatif disebut juga studi kasus karena objek penelitiannya seringkali bersifat unik, kasuistik, tidak ada duanya karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek penelitian, atau peneliti itu sendiri. Jadi, sebenarnya penelitian kualitatif itu tidak terbatas pada urusan data, objek penelitian, atau bahkan prosedur penelitian. Model penelitian jenis ini menurut J.R.Raco adalah bentuk penelitian kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Penelitian fenomenologi menurut Raco (2010, 83) memiliki dua dimensi, “dimensi pertama bahwa pengalaman setiap manusia terdapat sesuatu

yang hakiki, penting dan bermakna. Kedua pengalaman seseorang harus harus dimengerti dalam konteksnya”.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu sebagai upaya melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu kondisi, sifat, karakteristik, dari suatu fenomena atau obyek penelitian, atau hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan.

Penggunaan tipe ini dilakukan dengan alasan karena peneliti berusaha menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif fenomenologi. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui pencegahan penyelundupan barang.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, maka penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data

yang tidak langsung memberikan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer didapat dari studi lapangan, yaitu proses pengumpulan informasi, data, dan fakta secara langsung pada objek penelitian, dengan cara :

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung serta mencatat peristiwa, kejadian, dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri dalam melakukan pencegahan penyelundupan barang.
- 2) Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman.

b. Sumber Data Sekunder. Sumber data ini didapat melalui Studi literatur/Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang ada hubungannya dengan topik yang akan diteliti, termasuk data-data tertulis lainnya yang berasal dari lembaga yang dijadikan objek penelitian termasuk mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian, menurut Prasetya Irawan (2006;17-18) satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif adalah “peneliti itu sendiri”.

Peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrument utama sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Lebih lanjut Prasetya Irawan (2006: 53) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif “harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat *plural* (beragam), sering tidak terduga sebelumnya. Instrumen atau teknik yang paling sering digunakan adalah wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta observasi langsung terhadap objek penelitian”.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data empirik di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan terhadap obyek penelitian melalui sejumlah pendalaman dalam bentuk diskusi terfokus. Wawancara melalui sejumlah pertanyaan yang terfokus dilakukan secara logis berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap-tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis kerja.

D. Penentuan Informan

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dalam penelitian. Dalam melaksanakan wawancara mendalam, penulis menentukan beberapa sumber atau informan yang dianggap paling representatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan berdasarkan jabatan, pengalaman dan pemahaman atas objek yang diteliti. Teknik penunjukan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *sampel purposif*.

Menurut Menurut Prasetya Irawan (2006:10-11) mengatakan bahwa “sampel purposif yaitu penentuan sampel penelitian secara random (acak) menjadi tidak penting. Sampel dipilih secara sengaja (purposif)”. Karena itu sampel tidak perlu mewakili populasi. Bahkan istilah “populasi” itu sendiri menjadi tidak relevan untuk disebut. Pertimbangan penelitian sampel bukan berdasarkan pada aspek keterwakilan populasi didalam sampel. Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel (responden) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposif* yaitu orang yang memiliki pengetahuan cukup dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang spesifik dari upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui pencegahan penyelundupan barang. Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi ia harus memiliki banyak pengalaman tentang masalah penelitian dan secara sukarela menjadi sumber informasi meskipun tidak secara formal, mereka dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat.

Dalam penelitian ini, kelompok Informan kunci (*keys informan*) yaitu Koordinator Tim Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri yang mempunyai tanggung jawab secara keseluruhan atas berjalannya upaya pencegahan penyelundupan barang, koordinator pelaksana dan instansi terkait. Berikut daftar informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini;

Table 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	David Hastiasi	Kabid I Operasi Badan Keamanan Laut	
2	Haris	Satuan Intelkam Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
3	Febra	Petugas Bea Cukai Tanjungpinang	Bekerja sejak tahun 2010
4	Hendry Andysoma, S.Ip	Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara Dan Infrastruktur Kawasan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna	Menjabat mulai dari
5	Dian Ardiansyah Izhar	Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas	Menjabat mulai dari
6	Arnov	Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas	Menjabat mulai dari
7	Suprpto	Ketua Komunitas Merah Putih	Organisasi kemasyarakatan yang konsen dalam isu-isu di perbatasan antar negara
8	Zulaihi Ahmad	Tokoh Masyarakat Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	Penduduk lokal/tempatan Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna

Sumber: Data diolah, 2017.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton dalam Molcong (2001:103), analisis data adalah “proses

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*).

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

c. Display Data.

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara *display* data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan diinakai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

F. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengolahan data menurut Moleong (2007:330)

adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Dalam memenuhi keabsahan data dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari tempat yang berbeda (triangulasi sumber). Menurut Patton dalam Moleong (2007:29) yang dimaksud dengan triangulasi sumber adalah “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.

G. Objek Penelitian

Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam atas kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di tempat tertentu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono (2007:215) bahwa kegiatan penelitian kualitatif menyangkut “aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu”. Selanjutnya yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah upaya pencegahan penyelundupan barang yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.

H. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2002:107) adalah “subjek dari mana data diperoleh”.

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan penyelundupan barang oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameter atau pertimbangan dalam penentuan subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kebijakan upaya pencegahan penyelundupan barang oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
- b. Terlibat langsung sebagai koordinator/penanggung jawab upaya pencegahan penyelundupan barang oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
- c. Mengetahui kegiatan upaya pencegahan penyelundupan barang oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
- d. Ikut terlibat berkoordinasi dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penyelundupan barang oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.

I. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 136) menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah”. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi serta observasi lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERBATASAN DI KEPULAUAN RIAU

A. Dinamika Perbatasan Antar Negara

Permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat komprehensif (terpadu) dimulai dengan adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya.

Melihat permasalahan yang terjadi pada kawasan perbatasan maka dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, mengamanatkan perlunya perbatasan ditangani secara intensif dan terpadu melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Perhatian khusus difokuskan pada dua (2) hal yang saling terkait yaitu dilaksanakan melalui instrumen pembangunan nasional dan daerah. Keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan prasyarat mutlak untuk merealisasikan visi terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, tertib, sejahtera, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Provinsi yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perbatasan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Adapun tantangan yang dihadapi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

- 1) Luasan kawasan perbatasan laut. Secara geografis, wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang harus dikelola sangat luas dan melingkupi 19 pulau-pulau terluar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Namun saat ini (sejak tanggal 2 Maret 2017) jumlah pulau terluar yang ada di Kepulauan Riau bertambah menjadi 22 pulau berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kondisi geografis Kepulauan Riau terdiri dari 2408 pulau dan didominasi oleh lautan. Kondisi geografis ini tentunya menjadi tantangan tersendiri.
- 2) **Pengelolaan Kawasan Perbatasan oleh multi sektor**, baik vertikal maupun horisontal. Pengelolaan kawasan perbatasan merupakan urusan lintas sektor baik vertikal maupun horisontal. Secara vertikal, terdapat aspek-aspek meliputi penyelesaian batas antar negara dan pengamanan batas negara. Secara horisontal, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kawasan perbatasan melibatkan SKPD-SKPD lain seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pengembangan pariwisata. Tanpa ada koordinasi yang

baik, maka pengelolaan perbatasan akan tumpang tindih dengan arah yang tidak jelas.

- 3) Belum memadainya sumberdaya yang ada pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Kelembagaan BPP Provinsi Kepulauan Riau merupakan kelembagaan baru sehingga perlu mengembangkan infrastruktur kerasnya (sarana dan prasarana perkantoran, peralatan dan perlengkapan) hingga infrastruktur lunakya (SDM, tata kerja, koordinasi lintas sektoral dan lintas hirarki)
- 4) Adanya Pergeseran Orientasi Pembangunan Kawasan Perbatasan. Perlunya pergeseran orientasi pembangunan kawasan perbatasan menjadi *outward looking* (melihat ke luar), artinya membangun kawasan perbatasan untuk menangkap peluang-peluang yang ada di negara tetangga. Pendekatan keamanan menjadi tidak lengkap tanpa dilakukannya pendekatan kesejahteraan.

Disamping geografis Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri sebagaimana disebutkan diatas, Kepulauan Riau juga memiliki peluang yang dapat dikembangkan. Diantara peluang tersebut diantaranya:

- 1) Kota Batam sebagai salah satu Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Provinsi Kepulauan Riau yang relatif maju sebagai *entry point* pembangunan kawasan perbatasan. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yaitu kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, ditetapkan di Batam untuk kawasan barat dan Ranai untuk kawasan timur (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Untuk saat ini, Batam relatif telah maju dan mapan. Sebagai

pusat, maka Batam dan Ranai dapat menghasilkan multiplier effect bagi kawasan-kawasan perbatasan lainnya jika terdapat keterkaitan yang saling memperkuat. Jika keterkaitannya saling melemahkan, maka yang akan terjadi selanjutnya bukanlah multiplier effect melainkan backwash effect, yaitu efek berupa pengurasan sumber daya dari hinterland ke pusat.

- 2) Tidak terikat dengan permasalahan masa lalu, fokus pada kemajuan ke depan. Kelembagaan BPP Provinsi Kepulauan Riau merupakan kelembagaan baru sehingga terlepas dengan permasalahan masa lalu yang banyak dihadapi SKPD-SKPD lain. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk membuat awalan yang baik, dengan penelitian yang komprehensif mengenai potensi dan permasalahan kawasan perbatasan, menjalin koordinasi yang baik dengan SKPD-SKPD yang terkait hingga dapat merumuskan dan menjalankan program-program secara tepat sasaran dan efisien dalam mengatasi permasalahan dan memajukan kawasan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau.
- 3) Adanya payung hukum yang memberikan BPP Provinsi kewenangan dan landasan yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara payung hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 4) Adanya misi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan untuk menata dan membuka keterisolasian dan ketertinggalan kawasan perbatasan melalui peningkatan prasarana dan sarana perbatasan. Menjadi

tupoksi BPP Provinsi untuk melakukan penataan ruang (diharapkan dapat menjadi jalan untuk perbaikan perencanaan pembangunan yang sifatnya menitikkan pada pendekatan regional dibanding pada perencanaan yang sifatnya lebih sektoral.

B. Badan Pengelola Perbatasan

Sebagai provinsi yang memiliki perbatasan antar negara, pemerintah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau sepakat untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pada perda tersebut pemerintah provinsi membentuk Badan Pengelola Perbatasan dengan tugas utama yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perbatasan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Guna menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, BPP mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan kesekretariatan, meliputi pembinaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
2. Pengelola perbatasan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Pembinaan pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
4. Pengumpulan data bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengelola Perbatasan;

5. Penyiapan data dan bahan Pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelola perbatasan, potensi kawasan dan infrastruktur kawasan;
6. Pelaksanaan evaluasi pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelola Perbatasan;
8. Penyusunan laporan Pengelola Perbatasan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelola Perbatasan;
9. Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pengelola Perbatasan;
10. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelola Perbatasan yang diserahkan oleh Gubernur.

Tugas-tugas dalam hal pengelolaan perbatasan yang cukup banyak tersebut selanjutnya dijalankan oleh BPP Provinsi Kepulauan Riau dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPP, Kepala Badan tersebut maka dibentuklah susunan organisasi Badan Pengelola Perbatasan yang terdiri dari:

- a. Sekretariat. Sekretariat terdiri dari;
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Pengelolaan Batas Negara. Bidang pengelolaan Batas Negara terdiri dari;
 - a) Sub Bid Pengelolaan Batas Negara;
 - b) Sub Bid Pengelola Lintas Batas

- c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan. Bidang pengelolaan Potensi Kawasan terdiri dari dua sub bidang yaitu;
 - a) Sub Bid Potensi Kawasan Perbatasan;
 - b) Sub Bid Penataan Ruang Kawasan Perbatasan;
- d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan. Bidang ini terdiri dari 2 sub bidang yaitu;
 - a) Sub Bid Infrastruktur Sosial dan Ekonomi;
 - b) Sub Bid Infrastruktur Pemerintahan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Selanjutnya berikut dijabarkan tugas dari masing-masing bidang secara umum.

1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.

Sekretariat BPP dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Adapun tugas Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan yaitu, 1). Memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 2). Melakukan koordinasi dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; 3). Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan lintas sektor, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan 4). Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Sekretariat BPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1). Koordinasi dan penyusunan

rencana, program dan anggaran Badan Pengelola Perbatasan; 2). Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum; 3). Pelaksanaan kerjasama dan hubungan masyarakat; 4). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata usaha; dan 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga (3) Sub Bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Sub bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu, : 1) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran di lingkungan Badan Pengelolaan Perbatasan; 2) pelaksanaan koordinasi perencanaan program kerja jangka panjang, menengah dan tahunan di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan; 3) penyiapan bahan penyerasian program antar unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan; dan 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Sub Bagian Keuangan. Sub bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). pelaksanaan pengelolaan keuangan; 2). pelaksanaan

verifikasi dan akuntansi; 3). pembinaan bendaharawan; 4). pelaksanaan urusan gaji; dan 5). penyusunan laporan keuangan.

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian ini mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, rumah tangga dan tata usaha. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu: 1). pembinaan dan pengelolaan kepegawaian; 2). pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga; 3). penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta publikasi; dan 4) pelaksanaan urusan tata usaha Sekretariat Badan Pengelola Perbatasan.

2. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Batas Negara.

Bidang Pengelolaan Batas Negara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan. Bidang Pengelolaan Batas Negara mempunyai tugas yaitu: 1). melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara; 2). melakukan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; 3). mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara sesuai dengan skala prioritas; dan 4). melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut; 1). penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; 2). pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; 3). pelaksanaan koordinasi pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; 4). pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas sesuai dengan skala prioritas; 5). pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut, udara dan lintas batas; dan 6). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh dua (2) sub bidang terdiri dari :

- 1) **Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara.** Sub bidang ini mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, pemanfaatan, penegasan, pemeliharaan, pengamanan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara. Sub Bidang Pengelolaan Batas Negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana

aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan batas negara wilayah darat, laut dan udara; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan batas negara wilayah darat, laut dan udara; 3). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara sesuai dengan skala prioritas; dan 4). penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan batas negara wilayah darat, laut dan udara.

- 2) Sub Bidang Pengelolaan Lintas Batas. Sub bidang Pengelolaan Lintas Batas mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian, penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara. Sub Bidang Pengelola Lintas Batas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan lintas batas negara; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pelaksanaan lintas batas negara; dan 3). penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lintas batas negara.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan.

Bidang Pegelolaan Potensi Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan, Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan mempunyai tugas, yaitu: 1). melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kawasan Perbatasan; 2). melakukan inventarisasi potensi sumber daya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3). mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 4). melakukan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, pembangunan serta pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan.

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 1). penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 2). pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan potensi kawasan perbatasan; 3). melaksanakan inventarisasi potensi sumber daya kawasan perbatasan; 4). pemberian rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; 5). pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan potensi kawasan perbatasan sesuai dengan

skala prioritas; 6). pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan; dan 7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi ke dalam dua (2) sub bagian yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan. Sub bidang Potensi Kawasan Perbatasan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut. Sub Bidang Potensi Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut; dan 3). penyiapan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat dan laut.
- 2) Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. Sub bidang ini dalam menjalankan tugasnya yaitu menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan ruang

kawasan perbatasan. Sub Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan perbatasan; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran penataan ruang kawasan perbatasan; dan 3). penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang kawasan perbatasan.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan,

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan, yang mempunyai tugas yaitu: 1). melakukan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan infrastruktur Kawasan Perbatasan; 2). mengoordinasikan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3). mengoordinasikan penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan 4). melakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu: 1). penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; 2). pengoordinasian perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, serta sarana dan prasarana pendukung zona perekonomian, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; 3). pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan sesuai dengan skala prioritas; 4). pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur pemerintahan; dan 5). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terbagi menjadi dua (2) sub bidang yang terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Infrastruktur Sosial dan Ekonomi, yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sub Bidang Infrastruktur Sosial dan Ekonomi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana

aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat; dan 3). penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

- 2) Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan. Sub bidang Infrastruktur Pemerintahan mempunyai tugas; menyiapkan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan. Sub Bidang Infrastruktur Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yaitu: 1). penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi serta pengoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan; 2). penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur pemerintahan; 3). penyiapan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan infrastruktur pemerintahan.

5. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 Pasal 150 dibentuk untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Perbatasan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya secara lengkap struktur organisasi Badan pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam lampiran.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut menurut subjektifitas peneliti memiliki pemahaman, pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan informasi seputar pengelolaan perbatasan. Selain peneliti merupakan bagian dari pelaku atau pelaksana teknis pengelolaan perbatasan, peneliti juga sering berkomunikasi dan sekaligus berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut sehingga sangat memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing.

Pihak-pihak yang peneliti wawancara memiliki kewenangan serta kemampuan untuk memberikan gambaran yang luas untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tema penelitian yaitu pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun responden yang peneliti wawancara berikut *background* yang menjadi pertimbangan peneliti adalah sebagai berikut;

1. Indah Srie Purwatiningsih, merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. Indah menduduki jabatan sebagai kepala Bidang Pengelolaan Batas negara selama 4 tahun terakhir.
2. Hendry Andysoma, merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara Dan Infrastruktur Kawasan pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna

3. Dian Ardiansyah Izhar, merupakan Kepala Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas
4. David Hastiasi, Kabid I Operasi pada Badan Keamanan Laut dengan pangkat Letnan Kolonel. David bertugas di Bakamla sejak 2015 dan sering ikut serta dalam melaksanakan patroli dilaut baik secara mandiri yang dilakukan oleh Bakamla maupun patroli yang dilakukan secara bersama-sama (*on Boath*) dengan pihak lainnya.
5. Haris, merupakan Polisi yang bertugas di Satuan Intelkam Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ia bertugas di Polda Kepri dan intens terkait berkaitan dengan perbatasan.
6. Febra, petugas Bea Cukai di Tanjungpinang. Febra bertugas di Kantor Bea Cukai sejak 2010. Febra sering melakukan patroli bersama-sama dengan BPP Provinsi Kepulauan Riau
7. Arnov, Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas
8. Zulaihi Ahmad, Tokoh Masyarakat Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna.
9. Suprpto, merupakan Ketua Komunitas Merah Putih, sebuah organisasi kemasyarakatan yang konsen dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah perbatasan Kepulauan Riau.
10. AKP Haris J. Lambey, Ditpolair Babinkam Polda Kepulauan Riau.

Pihak-pihak yang diwawancara tersebut menurut peneliti memiliki kewenangan serta kemampuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.

B. Upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI

Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan, maka peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak. Wawancara tidak hanya dilakukan di internal BPP saja, tetapi juga dilakukan kepada beberapa pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan atau memiliki irisan tugas dengan BPP. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang diperoleh dari BPP memiliki kesamaan atau kemiripan informasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan lainnya.

Dalam melakukan pembahasan data-data yang diperoleh, peneliti mengklasifikasikan hasil penelitian ini menjadi beberapa bidang diantaranya : (1) bidang penegakan hukum, (2) bidang keuangan, (3) bidang sumberdaya manusia dan (4) bidang infrastruktur. Ke-empat bidang ini menurut peneliti sangat vital untuk melihat bagaimana upaya Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan karena keempat bidang ini merupakan hal yang dasar dalam berjalannya upaya pemberantasan penyeludupan barang, yaitu bidang penegakan hukum tentunya berhubungan dengan aturan – aturan yang berlaku, bidang keuangan merupakan dasar dari pemenuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, bidang sumberdaya yang

terkait pada kemampuan petugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta bidang infrastruktur yang merupakan pendukung dari pelaksanaan kegiatan. Berikut akan diuraikan bagaimana BPP Provinsi Kepulauan Riau menjaga kedaulatan NKRI dan perbatasan melalui empat bidang tersebut;

1. Bidang Penegakan Hukum dan Kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Polda terkait dengan penegakan hukum khususnya terkait dengan maraknya penyelundupan barang adalah dengan melakukan kerjasama dan sinergi antar lintas instansi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haris J Lambey, Kasubdit Polda Kepri pada tanggal 21 April 2016 di Batam :

“Oke dengan instansi-instansi lain, kita menciptakan sinergi yang mengarah pada penegakan hukum dan perumusan kebijakan yang perlu memiliki satu visi dan misi yang sama. Penyelundupan barang ini menjadi salah satu perhatian Bapak Kapolri, khususnya kalau di Batam ini Bapak Kapolda untuk melaksanakan pencegahan bahkan juga melaksanakan tindakan-tindakan preventif agar tidak ada lagi penyelundupan barang yang masuk ke wilayah Kepri. Disamping itu dengan instansi lain kita sering berkoordinasi bersama, dalam satu hulan minimal sekali kita duduk bersama untuk melaksanakan koordinasi. Instansi lain tersebut seperti Bea Cukai, Angkatan Laut, dan Bakamla. Koordinasi dan kerjasama ini adalah upaya bagaimana kita melakukan pencegahan agar meminimalisir penyelundupan barang masuk ke wilayah Kepri ini tidak lagi terjadi”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda bahwa upaya penegakan hukum dan perumusan kebijakan telah dilakukan guna menciptakan sinergi antar lintas instansi yaitu dengan Bea Cukai, TNI-AL dan juga dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kerjasama dan saling koordinasi dalam hal penegakan hukum dan perumusan kebijakan kebijakan adalah upaya untuk menyamakan tujuan sehingga masing-masing instansi memiliki visi dan misi yang sama. Sejalan dengan apa

yang dilakukan oleh Polda, peneliti mengkonfirmasi pernyataan pihak Polda terkait dengan sinergitas yang telah dilakukan dengan instansi lain salah satunya adalah dengan pihak Bakamla. Wawancara dilakukan kepada David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut yang mewakili Bakamla. Menurutny terkait dengan adanya kerjasama dengan penegak hukum ini dengan mengatakan bahwa:

“Upaya Sinergitas yang dilakukan bakamla selama ini yaitu dengan melaksanakan patroli bersama dalam satu kapal. Jadi dalam satu kapal itu terdapat beberapa orang yang mewakili instansi masing-masing. Setelah semuanya *on board* dalam kapal tersebut, kami melaksanakan estalabis lokasi kemudian kami melaksanakan cek komunikasi yang berjalan dipusat dari sini menuju kapal masing-masing, kemudian pada saat kapal berhenti, kami kembali meng *on board* kan (menaikan) satu orang lagi dari lembaga sandi Negara. Selanjutnya mereka membawa peralatan dari kantor dan kemudian pengiriman beritanya itu dalam bentuk *encrypt*. Dengan demikian maka tidak bisa dari instansi lain membuka berita itu karena sifatnya berita yang digunakan dalam telegram nanti bersifat rahasia, maka pengiriman dan penerimaanya di *encrypt*”

Selain patroli yang dilaksanakan bersama antara Polda dan Bakamla, Bea Cukai juga dilibatkan dalam patroli ini. Hal ini guna menjalin sinergi dalam penegakan hukum dan pengambilan kebijakan yang lebih lanjut. Guna mengkroscek informasi dari pihak Podla dan Bakamla, peneliti kembali melkukan wawancara dengan pihak Bea Cukai. Pada saat akan melakukan wawancara, peneliti diarahkan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang. Terkait dengan penegakan hukum dan pengambilan kebijakan lebih lanjut, Kepala Seksi mengatakan:

“ kalau bicara tentang penegakan hukum, Bea Cukai mengacunya kepada Undang-Undang Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbaaharui menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dalam UU 10/1995, terdapat 2 kategori hukuman bagi penyelundup, pertama hukum pidana dan

kedua hukum yang bersifat dengan sanksi, baik sanksi administrasi atau sanksi denda maupun sanksi lainnya. Pertanyaannya adalah hukum apa yang berkaitan dengan penyelundupan barang? Jika terkait dengan penyelundupan barang maka mengacunya adalah pada pasal 102,103 sampai dengan pasal 105 UU Kepabeanan. Dalam pasal 102 dinyatakan bahwa barang-barang yang berasal dari luar negeri yang masuk ke wilayah (Indonesia) Tanjungpinang dalam hal ini disebut sebagai barang impor. Selanjutnya dalam pasal 103 dinyatakan bahwa barang yang dibawa keluar dari pinang ke negara lain disebut sebagai barang ekspor. Dari tahun 2015, Bea Cukai telah melakukan beberapa hal yang kita lakukan untuk menegakkan hukum khususnya terkait dengan keluar masuknya barang. Barang yang masuk tanpa cukai dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya kita sebut sebagai “barang selundupan”. Artinya bahwa barang-barang yang masuk ke wilayah Negara Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi/sah serta tidak mengikuti prosedur resmi, maka itu artinya adalah barang selundupan dan pembawanya kita sebut sebagai penyelundup. Contohnya adalah pada saat kapal bersandar, maka pertama kali yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai adalah dengan melakukan pengecekan apakah dokumen kapal sesuai dengan muatan atau tidak. Kalaupun ternyata tidak sesuai, maka kita (Bea Cukai) melakukan penindakan. Hal itu pernah kita lakukan terhadap Kapal Pesiar (kapal pribadi) yang menurut dokumen berasal dari Singapura. Bea Cukai Tanjungpinang telah melakukan penindakan sebanyak 2 kali. Terkait dengan Kapal pribadi, ketentuannya adalah apabila tidak melampirkan atau memberitahukan kepada pihak Bea Cukai pada berupa manifest maka akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut berupa denda sebesar 5 juta rupiah dan 10 juta terhadap ketiadaan manifest. Berdasarkan pada pengalaman kita (Bea Cukai) pernah melakukan penangkapan pada tahun 2013 yaitu Kapal dari Malaysia yang membawa beras, gula, bawang, hp, rokok, dan lain sebagainya. Jika kapal tersebut berasal dari Batam, maka Bea Cukai Tanjungpinang akan melakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai Batam. Selanjutnya barang-barang tersebut sementara kita (Negara) kuasai sembari menunggu kepastian hukumnya. Terkait dengan proses lebih lanjut, Bea Cukai berkoordinasi dengan pihak kepolisian, namun selama ini memang belum ada penyidikan yang melibatkan pihak kepolisian. Jadi kalau ada penyidikan, Bea Cukai akan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian. Sanksi lainnya yang juga biasa kita lakukan adalah dengan melakukan koordinasi bersama yang dibantu oleh TNI-AL, POMAL dan MARINIR. Dengan keterlibatan berbagai pihak ini maka akan sangat membantu apabila diperlukan keterlibatan instansi lain sehingga permasalahan dapat segera dicarikan solusinya selama berada di lapangan.

Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda, Bea Cukai dan

Badan Kemanan Laut terkait dengan penegakan hukum dan kebijakan

lebih lanjut, maka dapat diketahui bahwa dalam upaya Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya terkait dengan upaya penyelundupan barang telah dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang tersebut antara lain adalah Bea Cukai, Kepolisian dan Badan Kemanan Laut yang dibantu oleh TNI-AL. Penegakan hukum atas keluar-masuknya barang adalah bentuk “lain” dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI. Menjaga kedaulatan NKRI harus dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai instansi yang memiliki keterkaitan dalam tugas dan fungsinya. Sinergi dan Koordinasi merupakan upaya untuk menyamakan visi dan misi. Dengan adanya kesamaan visi dan misi memungkinkan antar lembaga negara untuk saling menguatkan. Penegakan hukum seperti dengan melaksanakan amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan merupakan salah satu upaya konkrit menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bidang Keuangan

Keuangan menjadi salah satu faktor dalam upaya pencapaian kebijakan. Sebagai faktor pendukung maka dukungan anggaran merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan anggaran/keuangan terhadap upaya penegakan hukum maka peneliti melakukan wawancara keheberapa pihak. Wawancara pertama dilakukan kepada Polda Kepri yang mengatakan bahwa institusi Polri telah meningkatkan dukungan anggaran untuk kegiatan patroli. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haris J Lambey, Kasubdit Harwatah Polda Kepri sebagai berikut:

“ Kalau untuk dana secara khusus untuk tahun 2016 ini saja, kita dari pihak kepolisian memberikan dana yang cukup meningkat, karena pada saat ini pihak kepolisian mengadakan untuk mensupporting BBM polisi perairan, jadi bahan bakar kapal-kapal polisi perairan itu meningkat sampai 55%, yang dulu didukung hanya sekitar 10% - 30% sekarang meningkat sampai 55% secara total itu tidak bisa saya sebutkan karena ini dibidang anggaran, anggaran dari pihak polda. Terus, penggunaan dana tersebut kita disetiap pencegahan dan penyelundupan itu biasanya kita punya program yang diatur dalam rengiat harian, rengiat mingguan dan renggiat bulanan, renggiat mingguan atau bulanan ini diatur dengan penggunaan kapal-kapal yang akan melaksanakan patroli di wilayah-wilayah yang rawan dengan penyelundupan, jadi penggunaan dana tersebut langsung ke pihak user atau polisi perairan sebagai gerbang terdepan untuk mengatasi permasalahan penyelundupan ini di wilayah perairan kepri, dana tersebut sampai saat ini kami belum bisa bilang belum cukup karena untuk anggaran patroli yang seharusnya itu seperti contoh kita bandingkan dengan coast guard singapura atau coast marine singapura, mereka memiliki anggaran yang cukup untuk BBM itu, anggaranya system dua satu, jadi dua hari bekerja satu hari istirahat. Sedangkan untuk program polair sendiri polda kepri sendiri tidak ada program yang harus rutinitas disitu mereka wialayah ditaruhkan kapal ditaruhkan tetapi mereka tidak melaksanakan patroli sehingga penyelundupan masih banyak yang masuk ke wilayah kepri, sehingga dana tersebut menurut saya masih kurang cukup untuk mengatasi penyelundupan di wialayah kepri”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Polda bahwa upaya dalam bidang Keuangan adanya pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bagi Polisi Perairan. Selain adanya tambahan atau peningkatan bantuan BBM bagi Polair, peningkatan bantuan keuangan juga diherikan kepada Bakamla. Hal ini disampaikan langsung oleh David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut. Dari wawancara yang dilakukan kepada Bakamla dapat diketahui bahwa kegiatan patroli mendapat tambahan dukungan anggaran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan mangatakan;

“ Baik, kami akan menjawab sebagaimana yang kami ketahui saja, kami tidak bisa memberitahukan berapa jumlah yang diberikan.

Namun dapat kami sampaikan bahwa kami dalam melaksanakan kegiatan patroli yang berguna untuk melakukan pencegahan penyelundupan dan yang lainnya mendapat dukungan penuh dari (Bakamla) Pusat. Peningkatan bantuan ini kami gunakan untuk mencegah illegal fishing dan tindakan pidana lainnya yang terjadi dilaut serta mencegah terjadinya penyelundupan barang. Kalau ditanya soal jumlahnya berapa, kami tidak bisa jawab karena kebijakan itu sepenuhnya berada di Jakarta. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan kami berusaha untuk mengoptimalkan seluruh penggunaan bahan bakar yang diterima dan juga bahan makanan. Dalam satu bulan terakhir kami menerima jumlah makanan yang cukup, sejumlah uang untuk makanan tambahan yang kemudian kami masak. Selain itu kami juga mendapat insentif dari kegiatan operasi tersebut. Saat tidak melakukan patroli, kami melakukan pengecekan kapal untuk mencegah maupun menghindari kerusakan. Dari sisi insentif, kami merasa sudah lebih dari cukup.”

Selain Polda dan Bakamla, sama halnya dengan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Pihak Beacukai Tanjungpinang, yaitu adanya pengadaan terhadap bahan bakar, dimana wawancara mengatakan bahwa:

“ dana anggaran pusat dan dari sini mendapatkan dari pusat, karna tiap bulan melaporkan juga. masalah jumlahnya kita kurang etnis juga, tapi cukup lah...karna kita juga disiapkan kapal trus kendaraan patroli dan uang bensinnya itu”.

Dari hasil wawancara tersebut diatas maka peneliti mengambil kesimpulan sementara terkait dengan bidang keuangan, stake holder terkait telah berupaya memberikan dukungan dalam upaya mencegah masuknya barang-harang ilegal masuk ke perairan Kepulauan Riau. Dukungan tersebut berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing instansi yang terlibat dalam menjaga wilayah NKRI.

3. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola perbatasan, maka peneliti melakukan wawancara dengan

beberapa pihak yang terlibat. Wawancara pertama dilakukan kepada Haris J Lambey, Kasubdit Harwatah Polda Kepri, ia mengatakan bahwa:

“ Saya jawab, satu persatu dulu, untuk petugas yang menangani masalah penyelundupan disini dari pihak polda itu dua instansi, yang memang fokus untuk pencegahan dan penyelundupan yang pertama adalah polisi perairan dan yang kedua adalah polisi krimsus (kriminal khusus). Krimsus menangani penyelundupan terhadap illegal maining ataupun penyelundupan dibidang lainnya, tetapi dua instansi itulah yang menangani masalah-masalah penyelundupan paling dominan. Kedua unit ini memang khusus menangani hal-hal terkait dengan pencegahan dan penyelundupan. Khusus di Kepulauan Riau, penyelundupan paling banyak terjadi melalui laut. Oleh karenan itu inereka melakukan patroli secara rutin, dan patroli rutin itu sudah diatur dalam rencana kegiatan yang saya sebutkan tadi. Maraknya penyelundupan di Kepulauan Riau ini tidak terlepas dari banyaknya “pelabuhan tikus”. Jumlah pelabuhan ini sangat banyak, untuk Kota Batam itu saja yang terdata sampai sekarang hampir ada ratusan pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus merupakan pelabuhan yang tidak resmi dan biasanya menjadi tempat aman bagi para penyelundup untuk bisa memasuki wilayah Batam tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian maupun aparat kewanman yang lain. Apabilakita bandingkan jumlah pelabuhan tikus yang ada diwilayah Batam dengan jumlah personil yang melaksanakan patroli, maka jumlah tersebut tidak sebanding dan tidak mencukupi untuk menjaga perairan Batam yang sangat luas ini. Apalagi keahlian (SDM) dan infrastruktur yang dimiliki oleh kepolisian sendiri yang masih kurang untuk melaksanakan patroli. Dalam satu hari, kepolisian hanya bisa melaksanakan patroli rata-rata sekali dan kita harus menempatkan 30 personil dalam satu hari. Sedangkan ada ratusan pelabuhan tikus yang ada di Batam dan harus diawasi. Untuk menunjang tugas pokok masing-masing saja khususnya dalam menangani pencegahan dan penyelundupan ini, menurut saya keahlian yang dimiliki oleh masing-masing aparat masih kurang memadai” .

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa persoalan luas wilayah perairan Batam tidak terjangkau dengan peralatan dan SDM yang ada saat ini. Ditambah dengan banyaknya jumlah pelabuhan tikus yang ada di Batam dan bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Tentulah ini menjadi kendala yang sangat besar dalam menjaga kedaulatan Batam dan NKRI pada umumnya. Namun demikian Kepolisian telah memiliki perangkat yaitu

Direktorat Kriminal Khusus dan Kepolisian Air untuk menjaga keamanan wilayah air.

Lebih lanjut Peneliti melakukan wawancara dengan Badan Kemanan Laut untuk mengetahui bagaimana dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia khususnya laut Batam. Pihak Bakamla melalui David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut mengatakan bahwa:

“ Baik tadi kami telah sampaikan, karena fungsi dari Bakamla sendiri tidak pada fungsi menangani penyelundupan saja, tapi pada fungsi yang lebih luas lagi yaitu tentang *maritime security*. Bakamla fokus pada kegiatan-kegiatan dilaut termasuk keselamatan dan keamanan. Secara yuridiksi, wilayah perairan Indonesia itu cukup luas, namun dalam pelaksanaan operasinya secara khusus. Padasaat pelaksanaan operasi, kita memiliki kapal Negara yang didalamnya ada Bea cukai dan Kementrian Perikanan. Bea cukai menangani masalah kepabeanan dan Kementrian Perikanan menangani masalah perikanan saja. Selain dalam menjalankan operasi menggunakan kapal Negara, Bakamla juga sering menggunakan *sea reader*, kemudian orang-orang yang mengawaki kapal tersebut terhubung dengan server system yang didalamnya berisi dengan orang-orang dengan background intelejen sehingga dalam satu kapal jumlah awaknya bisa mencapai sekitar 23 orang sampai 25 orang. Kemudian untuk kapal *sea reader* biasanya diawaki oleh lima hingga enam orang. Pengawalan terhadap kapal yang memiliki *server system* itu jumlahnya lima orang dan berada di daerah Aceh, Natuna, Tanjungbalai Karimun, Batam Nongsa. Untuk satelit utamanya berada di Bangka Belitung dan di Sambas. Satelit tersebut sering disebut Stasiun Pemantau Keamanan Dan Keselamatan Laut (SPKKL)”.

Guna memperdalam informasi yang telah disampaikan oleh pihak Polda dan Bakamla terkait dengan upaya pencegahan penyelundulan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea cukai Tanjungpinang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam meningkatkan kapasitas SDM pegawai di Bea Cukai. Berikut hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai dengan mengatakan:

“terkait itu (peningkatan kapasitas), kita namai dengan diklat rutin, ada namanya diklat pelatihan dan diklat fisik. Pegawai Bea Cukai di Tanjungpinang ini rata-rata pegawainya sudah berumur (orang tua) dan lulusan SMA. Adatambahan sebanyak 15 orang dengan kualifikasi Strata 1 (S1). Untuk peningkatan kapasitas SDM didasarkan pada aturan yang ada. Namun peraturan yang ada sering mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Peningkatan keahlian di Bea Cukai disebut dengan PDOKP (Pembinaan, keterampilan, dan pengetahuan). Pihak Bea Cukai mengadakannya selama satu (1) bulan disini (kantor). Selain itu kita rutin melakukan pengawasan terhadap peredaran dan pemasukan narkoba. Khusus narkoba Bea Cukai memiliki tim khusus. Guna meningkatkan kemampuan tim ini, Bea Cukai mengundang pembicara dari pusat dalam berbagai pelatihan. Terkait dengan keahlian SDM saat ini apakah sudah memadai?, menurut saya sudah cukup, cuman harus ada peningkatan yang dilakukan secara terus menerus.”

Dari hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai tersebut diatas dapat diketahui bahwa kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam upaya Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau khususnya menghadapi berbagai macam penyelundupan telah dilakukan secara kontinyu. Kontinuitas tersebut merupakan upaya yang berkesinambungan untuk menjaga kedaulatan NKRI dari upaya-upaya penyelundupan barang-barang yang dilarang oleh aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

4. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kedaulatan NKRI selain SDM para aparat. Guna mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi infrastruktur pendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI, peneliti melakukan wawancara dengan pihak Polda. Dari wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda Haris J Lambey, Kasubdit Harwatah Polda Kepri), didapat informasi sebagai berikut:

“Jadi kita jawab satu persatu mengenai infrastruktur apa saja yang mendukung kinerja dalam upaya pencegahan penyelundupan di wilayah Kepri ini. Infrastrukturnya yang kita miliki hanya infrastruktur berupa pelabuhan Polair. Dermaga atau pelabuhan yang dimiliki oleh Polair juga didukung dengan kapal-kapal patroli, tetapi kapal-kapal patroli yang kita miliki (kepolisian) itu kapal patroli yang bertipe C. Kapal patroli tipe C merupakan tipe terendah dibawah tipe B dan Tipe A. Padahal dengan wilayah Kepri yang sebagian besar (96%) adalah wilayah perairan, maka dukungan kapal patroli dengan Tipe C masih belum optimal. Terbatasnya kapasitas dermaga juga berdampak pada keterbatasan tempat untuk menambatkan kapal-kapal hasil tangkapan. Belum lagi sarana pendukung untuk perawatan kapal-kapal milik Polair. Kapal-kapal hasil tangkapan yang sedang dalam proses pengadilan memerlukan perawatan karena kapal tersebut dijadikan sebagai barang bukti. Dengan terbatasnya dermaga tadi tentu tidak semua kapal hasil tangkapan bisa di tambatkan di pelabuhan. Belum lagi jika kapal patroli kita mengalami kerusakan sehingga perlu *docking (maintenance/perbaikan)* sehingga memerlukan tempat yang lebih. Disinilah yang saya maksud bahwa infrastruktur pendukung (pelabuhan) belum mendukung untuk melakukan pengawasan terhadap banyaknya pelabuhan tikus yang ada. Apalagi luas wilayah Kepulauan Riau yang 96% adalah lautan. Belum lagi ada waktu-waktu rawan yang terjadi di wilayah perairan Kepri ini sehingga diperlukan pengawasan yang ekstra”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Polda tersebut selanjutnya peneliti mengkonfirmasi kepada Bakamla untuk mengetahui kapasitas infrastruktur yang dimiliki oleh Bakamla. Untuk itu wawancara peneliti lakukan kepada David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut. Melalui Kasubdit ini diketahui bahwa;

“Infrastruktur yang mendukung saya dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penyelundupan di laut, yang pertama adalah sarana *survile system* yang bisa memonitor. Dengan teknologi maka tidak mengalami kelelahan seperti manusia yang mudah lelah. Kalau *survile system* itu melalui radar pemantau *automatic identification system*, kemudian CCTV atau *long range camera*. Disamping itu kita juga ada alat CCTV yang bisa melihat dalam kondisi gelap (malam hari). Juga radar-radar yang bisa beroperasi pada saat hujan lebat dan kondisi-kondisi alam tertentu, itu alat-alat pendukung. Alat-alat utama untuk melakukan penindakan harus tersedia aset-aset di laut seperti kapal-kapal patroli. Kalau di Bakamla disebut kapal Negara, kalau di Angkatan Laut penyebutannya Kapal Republik Indonesia, kemudian kalau di bea cukai namanya KP juga diperikanan namanya KP, kalau KPLP penyebutannya KN, itu harus ada kapal-kapal yang mampu beroperasi baik di pangkalan perairan dangkal hingga perairan dalam

sampai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Dengan kapal-kapal yang memiliki mampu beroperasi dengan kondisi dan karakteristik cuaca tertentu tersebut maka pencegahan dan penindakan akan lebih efektif. Apalagi Kepulauan Riau memiliki laut cina selatan yang terkenal dengan ombaknya yang tinggi dan berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu maka kapal-kapal yang beroperasi tersebut harus didukung dengan peralatan canggih. Saya kira kita memiliki kemampuan untuk membuat kapal yang dilengkapi dengan *drones* sehingga tidak perlu awak untuk memonitor perairan sekitar. Disamping itu memang diperlukan SDM yang siap untuk melakukan kemampuan untuk beroperasi secara bergantian. Dengan adanya rotasi secara berkala maka kita bisa melihat *real* radar yang kita miliki dan juga langsung terkoneksi dengan pusat kendali informasi. Hal ini tentu akan memberikan data yang update pada saat kapal keluar masuk perairan Kepulauan Riau. Jika hasil analisis ternyata ada kapal yang mencurigakan atau mereka punya ciri sebagai perompak, maka kapal tersebut dapat langsung di kejar untuk selanjutnya ditindak. Hal demikian pernah terjadi di laut cina selatan dimana ada kapal ikan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Oleh kapal dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dilakukan pengawasan dan ternyata mereka (Kapal Asing) tersebut disupport oleh *coast guard* mereka. Bahkan tidak berapa lama muncul kapal perang berbendera Taiwan dari belakang. Selanjutnya kapal ikan asing tadi menyebar jaring di daerah perairan Indonesia (bagian Timur Aceh). Nah disana mereka mengambil ikan sehingga Bakamla melakukan pengusiran dan diberikan peringatan dengan cara menembak ke udara sebagaimana standar prosedur yang kita miliki. Setelah diberikan tembakan peringatan tersebut akhirnya mereka melarikan diri. Kondisi tersebut dapat dengan cepat kita lakukan jika kita mempunyai peralatan yang cukup untuk memantau perairan Indonesia selama 24 jam, yaitu dengan *servant system* terbang. Kalau di Singapura namanya AX atau Aua Really Warning, dia (AX) selalu berada di udara kemudian ketika dia turun, naik lagi jadi dia berada di udara selama 6-8 jam. Sehingga jika punya beberapa alat seperti itu mereka bisa naik-turun secara bergantian. Apalagi kondisi perairan Indonesia yang begitu luas sehingga tentunya membutuhkan berapa kapal yang memiliki pesawat dengan kemampuan setara dengan AX yang harus bisa mantau 24 jam sehari. Kemudian kondisi infrastruktur yang ada saat ini yaitu asset laut, kita juga harus memiliki asset udara. Jika dilaut kami punya dermaga, maka untuk mendukung aset udara kita juga harus punya landasan.

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Kepala Seksi Penindakan Dan Penyidikan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Beacukai Tanjungpinang. Kepala Seksi mengatakan bahwa:

“Darisini fasilitas dan prasarana, kita sudah cukup. Kapal patroli ada, kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 juga ada. Selanjutnya alat-

alat untuk mendeteksi narkoba maupun pita cukai juga sudah ada. Kemudian untuk minyak (BBM) baik untuk kendaraan laut maupun kendaraan yang ada di darat kita juga telah disiapkan. Namun demikian kendaraan-kendaraan tersebut harus remajakan mengingat sudah beberapa diperbaiki. Selanjutnya untuk kapal perlu terus kita tingkatkan agar memiliki kemampuan untuk melakukan dektesi terhadap kapal-kapal yang tidak berdokumen. Apalagi jika kapal tersebut mematikan lampu. Mematikan lampu adalah modus yang sering digunakan oleh kapal-kapal yang terduga ilegal.”

Dari hasil wawancara terkait dengan ketersediaan dalam bidang Infrastruktur sebagai upaya Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam Menjaga Kedaulatan NKRI, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan upaya-upaya pemenuhannya. Diantaranya upaya-upaya tersebut antara lain adalah pembangunan pelabuhan polair. Disamping itu juga sedang diupayakan pengadaan kapal-kapal patroli sebagai bentuk dukungan. Selanjutnya pemenuhan sarana survile system dan juga kendaraan dinas baik berupa roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) serta alat-alat pendeteksi narkoba maupun detektor pita cukai.

Temuan atas minimnya infrastruktur di daerah perbatasan juga dibenarkan oleh Suprpto, Ketua Komunnitas Merah Putih yang mengatakan bahwa;

“persoalan infrastruktur di daerah perbatasan yang minim dan cenderung jauh dari kata layak. Kondisi ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jangankan bicara soal infrastruktur jalan, bicara soal mudahnya akses komunikasi saja sangat sulit. Anambas adalah salah satu contoh daerah perbatasan di Kepulauan Riau yang sangat sulit dalam akses komunikasi.”

Dengan demikian maka peneliti menyimpulkan bahwa persoalan utama di daerah perbatasan tergolong complicated. Persoalan penegakan hukum, minimnya anggaran, keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya infrastruktur dasar adalah kendala utama dalam pengembangan

perbatasan khususnya dalam mendukung penjagaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pihak-pihak yang diwawancara tersebut diatas menurut peneliti memiliki kewenangan serta kemampuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI.

B. Hambatan-hambatan Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan NKRI

Hambatan-hambatan dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI khususnya yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini diakui masih tetap ada. Diantara hambatan yang dihadapi oleh BPP Provinsi Kepulauan Riau adalah dalam hal pemahaman atas aturan yang ada. Perbedaan pemahaman atas regulasi yang ada diakui oleh Kasubdit Harwatah, Haris J Lambey sebagaimana yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Hambatan yang terjadi yaitu pada saat pelaksanaan operasi. Biasanya kalau kita sedang berkoordinasi di tingkat instansi itu terjadi pada saat pelaksanaan, masing-masing instansi memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda dalam pencegahan dan penyelundupan barang ini, contohnya ini sebenarnya lebih intens kea rab bea cukai, karena bea cukai memiliki Undang-Undang tentang pencegahan dan penyelundupan, tetapi kami selaku di Polri dan di Polda juga, polisi perairan dan polisi krimsus kami juga memiliki Undang-Undang yang bisa melaksanakan pencegahan tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan dilapangan kurang adanya koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bea cukai dengan instansi-instansi lainnya”.

Hambatan selanjutnya (kedua) adalah luasnya wilayah serta adanya faktor-faktor budaya yang ada di Kepulauan Riau. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada David Hasfiadi, Kasubdit Patroli Keamanan Laut Bakamla. Ia mengatakan bahwa:

“Hambatan yang ditemui dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang pertama yang kami temukan dilapangan adalah terkait dengan luasnya wilayah. Kami harus mengawasi mulai dari pantai timur Aceh hingga barat, kemudian sampai Batam dilanjutkan kedaerah Bangka. Bahkan

kami harus ke Jakarta kemudian Natuna kemudian samai ke pangkalan Bun. Garis pantai ini sangat luas, kemudian sampai ke pulau-pulau yang terbuka dimana mereka itu bisa masuk dan keluar tanpa pengawasan karena sistem-sistem yang ada disini tidak semuanya dapat menutupi kemungkinan-kemungkinan negatif tadi. Jadi, kita ini berada didaerah yang terbuka. Kalau kita berada didaerah yang didepan mungkin akan kelihatan adanya penyelundup, tetapi ketika kita turun (ke Kota) dan kapal kita taruh disini, maka semuanya akan berubah dann pandangan kita akan terbatas. Disamping soal luasnya wilayah yang harus diawasi, hambatan berikutnya adalah budaya. Hubungan budaya masyarakat yang di Dumai dengan masyarakat yang ada di Malaka itu sudah terjalin turun temurun. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan pertukaran barang seperti rokok dengan baju, kayu dengan beras. Jadi barter sudah berlangsung lama. Disamping itu daerah ini juga tidak terkontrol pengawasannya karena patroli tidak dilaksanakan secara terus menerus. Seharusnya didaerah seperti ini dipasang CCTV sehingga kapal yang keluar masuk bisa terpantau dengan baik. Pernah kita ajukan pengadaanya, namun kendalanya yang dihadapi adalah lambanya birokrasi. Indonesia dari dulu terkenal dengan birokrasinya yang panjang, berbelit-belit dan susah. Birokrasi seperti ini juga termasuk yang ada di Batam. Kami pernah membuat rencana seperti itu dan terkendala oleh birokrasinya yang panjang. Disamping budaya warga Dumai dan Malaka, budaya tersebut juga sudah terjalin antara masyarakat pesisir sumatera dibagian timur dan kemudian Malaysia di bagian barat yang sudah terjalin. Kita sudah berusaha melakukan pencegahan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat pesisir, namun demikian tidak semua bisa mengerti karena pendidikan mereka tidak sampai tahap yang demikian. Merekabicaranya "saya butub makan". Yangbisa dilakukan adalah membuat forum diskusi grup yang dilakukan dengan bekerjasama bersama pihak-pihak yang memiliki kesamaan dalam menghadapi suatu masalah. Bahkan dibeberapa tempat mereka melaksanakan itu diskusi group terbatas atau FGD untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masing-masing berdasarkan dengan panduan hukum yang ada".

Dari apa yang disampaikan oleh Kasubdit Harwantah tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua hambatan utama dalam upaya pencegahan penyelundupan barang di Kepulauan Riau. Hambatan *pertama* adalah banyaknya regulasi yang menjadi payung hukum masing-masing instansi pengelola perbatasan. perbedaan payung hukum ini perlu diharmonisasi khususnya untuk memperkuat pengelolaan perbatasan. Hambatan *kedua* adalah luas wilayah yang harus diawasi oleh masing-masing instansi sehingga diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan bisa berupa

pembuatan kantor bersama antar seluruh instansi yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. Hambatan *ketiga* adalah minimnya infrastruktur di daerah perbatasan. Infrastruktur yang memadai akan sangat membantu dalam menjaga kedaulatan negara. Analogi sederhana tidak mungkin binatang ternak ke halaman tetangga jika rumput di sekitar tempatnya hijau.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian yaitu pada daerah-daerah di kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan perairan luar negeri, maka telah dilakukan intervensi dari beberapa bidang yaitu dibidang Hukum dan Kebijakan, bidang Keuangan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan bidang Infrastruktur. Upaya di bidang Hukum dan kebijakan yaitu dengan upaya menciptakan sinergi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mengarah pada penegakan hukum dan perumusan kebijakan secara bersama-sama agar memiliki visi dan misi yang sama.

Dalam bidang Sumber Daya Manusia yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain secara berkala. Bahkan tidak jarang BPP Provinsi melaksanakan patroli on board, yaitu patroli yang dilakukan bersama-sama dengan instansi lainnya seperti Bea Cukai, Bakamla dan Polairud. Dalam bidang keuangan BPP juga memberikan bantuan kepada Polairud atau Polisi Perairan guna melakukan patroli untuk mengecek apakah dokumen sebuah kapal sudah sesuai atau tidak. Dalam bidang infrastruktur, BPP mendorong pembuatan pelabuhan untuk Polair serta melengkapi peralatan pendukung

seperti sarana survilife system, serta pengadaan kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2.

Berdasarkan intervensi pada beberapa bidang di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada objek penelitian yaitu daerah-daerah di kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan perairan luar negeri, yang dibutuhkan dalam penanganan masalah penyeludupan ini adalah sinergitas dan harmonisasi antar lembaga yang berwenang.

Guna memperkaya dan melihat sejauhmana penelitian ini memenuhi harapan maka dapat dilakukan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syaiful K dengan judul “Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)” oleh Muh. Syaiful K. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare), dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang. Ditemukan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu bahwa upaya mencegah dan menanggulangi setiap pelanggaran hukum khususnya mengenai masalah ekonomi dan keuangan negara, merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. Pemerintah seharusnya menindak dengan tegas setiap bentuk pelanggaran di bidang ekonomi. Salah satunya adalah tindak pidana dalam bidang kepabeanan yaitu tindak pidana penyelundupan. Hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak jaman Belanda yaitu *Staatsblads* No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut disempurnakan melalui UU No. 7 tahun 1955 jo

UU No. 8 tahun 1958, UU No. 10 tahun 1995 dan terakhir UU No. 17 tahun 2006. Penelitian yang dilakukan di dua tempat yang berbeda ini, yaitu di Polrestabes Pare-pare dan Bea Cukai Pare-pare dengan melakukan wawancara dengan petugas di kedua institusi tersebut. Disamping itu penelitian kepustakaan juga dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, dan sumber yang berhubungan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Barang. Hasil penelitian lapangan diketahui bahwa Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare) sulit untuk melakukan pemberantasan secara menyeluruh terhadap para pelaku atau penyelundup, disebabkan karena para petugas dalam menghadapi bujukan dan rayuan masih terpengaruh dengan oknum-oknum penyelundup, lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait di lapangan memberikan peluang bagi penyelundup sehingga sanksi pidana tidak secara langsung dirasakan oleh penyelundup. Sedangkan yang ada di Bea Cukai, tindak pidana penyelundupan barang di Kota Pare-pare disebabkan karena penegak hukum dan penyelundup hanya menyelesaikan di luar pengadilan. Penelitian ini menyarankan agar Kantor Pelayanan Bea Cukai Pare-pare lebih meningkatkan intensitas Patroli di wilayah perairan pare-pare dan sekitarnya serta menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengingat hal tersebut sangat merugikan pemerintah Republik Indonesia dari sektor penerimaan pajak dan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dengan menegakkan hukum dengan tegas, adil, dan tidak diskriminatif.

Kemudian penelitian yang dilakukan bersama antara Muhammad Zaenuddin, Didi Istardi, dan Muslim Ansori dengan judul “Maraknya Praktek

Transaksi ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam” juga mengungkapkan masih terjadinya praktek-praktek perdagangan yang ilegal meskipun Batam sudah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. Hasil pengamatan selama 2 tahun (2013-2014) ditemukan fakta bahwa banyak terjadi penyelundupan barang sebanyak 59,18%, Narkotika 16,3%, Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Indonesia ilegal 6,12%, *money loundry* 5,1%, kegiatan ilegal lainnya 5,1%, pembuangan limbah 3,06%, trafficking 2,04%, *illegal trading* 2,04%, dan *illegal logging* 1,02%. Untuk kegiatan penyelundupan, jenis barang yang paling sering diselundupkan adalah mobil 25,86%, BBM 15,52%, elektronik seperti HP dan laptop (15,52%), makanan, minuman dan rokok 13,79%, barang bekas (balpres) 12,07%, barang-barang lain 10,34%, dan minuman keras 6,9%. Sedangkan tempat yang frekuensinya paling sering ditemukannya kegiatan ilegal atau barang ilegal adalah pelabuhan resmi yaitu sebanyak 31%. Kemudian disusul perairan Batam 26,97%, pelabuhan tak resmi 18,18%, tempat lainnya 13%, tidak disebutkan secara spesifik 10,4%, dan bandara 1,3%. Dari aktifitas ilegal tersebut maka potensi kerugian negara sekitar 212,5 milyar rupiah. Selanjutnya instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kegiatan ilegal di Batam antara lain kepolisian 46,32%, bea cukai 32,63%, Lanal Batam 8,42%, instansi lain 8,4%, imigrasi 3,16%, dan Otorita Batam 1,05%.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa objek penelitian adalah sama yaitu daerah-daerah yang berada di kawasan perbatasan. Dan ditemukan permasalahan yang sama yaitu sinergitas dan harmonisasi baik dari lembaga penegak hukum, payung hukum yang diberlakukan serta kepastian dalam menegakkan payung

hukum adalah yang sangat dibutuhkan dalam pemberantasan penyeludupan di kawasan daerah perbatasan .





BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari upaya di bidang Hukum dan Kebijakan, bidang Keuangan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan bidang Infrastruktur. Upaya di bidang Hukum dan kebijakan yaitu dengan upaya menciptakan sinergi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mengarah pada penegakan hukum dan perumusan kebijakan secara bersama-sama agar memiliki visi dan misi yang sama.

Dalam bidang Sumber Daya Manusia yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain secara berkala. Bahkan tidak jarang BPP Provinsi melaksanakan patroli *on board*, yaitu patroli yang dilakukan bersama-sama dengan instansi lain seperti Bea Cukai, Bakamla dan Polairud. Dalam bidang keuangan BPP juga memberikan bantuan kepada Polairud atau Polisi Perairan guna melakukan patroli untuk mengecek apakah dokumen sebuah kapal sudah sesuai atau tidak. Dalam bidang infrastruktur, BPP mendorong pembuatan pelabuhan untuk Polair serta melengkapi peralatan pendukung seperti sarana *survillife system*, serta pengadaan kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga kedaulatan NKRI tentunya tidak semulus yang direncanakan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh

BNPP. Hambatan-hambatann tersebut antara lain pertama, dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing instansi memiliki payung hukum (UU) dan peraturan yang berbeda khususnya dalam hal pencegahan dan penanganan atas penyeludupan barang. Kedua, luasnya wilayah perairan Kepulauan Riau yang mencapai 96% menjadi tantangan tersendiri dan masih adanya faktor-faktor budaya berupa ego sektoral yang mempengaruhi masing-masing instansi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain adalah sebagai berikut;

- 1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau perlu mendorong supaya instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjaga kedaulatan NKRI membuat satu pusat komando (*comand center*) guna mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya menjaga kedaulatan negara.
- 2) Perlu adanya sinkronisasi regulasi yang menjadi payung hukum bagi masing-masing instansi yang terlibat dalam penjagaan kedaulatan negara.
- 3) Perlu adanya penyadaran kepada masyarakat akan arti penting menjaga kedaulatan negara. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan sekaligus asistensi kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu diwaspadai dan selanjutnya di laporkan kepada pihak-pihak terkait agar kedaulatan negara dapat dijaga secara bersama-sama.
- 4) Masyarakat nelayan khususnya perlu diberikan bekal berupa peralatan yang akan berfungsi untuk menyampaikan *early warning* (peringatan dini) kepada aparat penegak hukum (Polda, Bea Cukai dan BAKAMLA) atas tindakan-tindakan yang terindikasi melanggar kedaulatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- B.Ripley, Randall & Franklin, Grace A. 1982. *Bureucracy and Policy Implementation*. Homewood: The Dorsey Press.
- Baharudin, Lopa. 1992. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bappenas RI. 2005. *Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara: Buku Rinci di Provinsi Kepulauan Ria*. Kepulauan Riau : Bappeda
- Boriboonrat, Pimupsorn. 2013. *Collaborative Border Management in Thailand and Neighboring Countries: Needs, Challenges and Issues*, International Journal of Criminal Justice Sciences (IJCJS) -- Official Journal of the South Asian Society of Criminology and Victimology (SASCV) ISSN: 0973-5089 January – June 2013. Vol. 8 (1): 1–12
- Bryson, John. 2001. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada
- Cameron, Kim S. & Quinn, Robert E. 1999. *Diagnosing and Changing Organizational Culture : Based on The Competing Values Framework*, New York, Addison - Wesley
- Darnaputra, Rizal. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: ISDSPS Press,
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elexmedia. Komputindo
- Dwidjowiyoto dan Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Kumpotindo, Gramedia.
- Dwidjowiyoto dan Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Gramedia.
- F. Rangkuti. 1998. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama.
- Gibson, Ivancevich, Donelly. 1996. *Organisasi, Edisi 8, Jilid I*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Goldworthy dan Ashley. 1998. *Australian Public Affairs Information Service*. Australia: APAIS.
- Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta : Erlangga
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamel, G dan Prahalad, C, K. 1995. *Kompetisi Masa Depan*. Yogyakarta: Bina Rupa Aksara.
- Hamzah. 1985. *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J.Setiadi, Nugroho. 2008. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Kencana
- Jusmaliani. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Insani*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, T.Yeremias. 1995. *Indikator Kinerja Pemda, Pendekatan Manajemen dan Kebijakan*. Yogyakarta : Fisip UGM
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT.Nusamedia Nuansa
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2003. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Lexy J, Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lexy J, Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Marrus, Stephanie K. 2002. *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. USA: Wiley
- Mathis dan Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni Bandung
- Mintzberg, Henry, dan James Brian Quinn. 1988. *The Strategy Process : Concepts, Contexts, Cases*, 2nd Ed., New Jersey: Prentice Hall.
- Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Adji Suradji, dkk, 2017. *Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method*. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), Vol.21 (2), November 2017, 166-179
- Nakamura, Robert.T. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St.Martins Press.
- Pahlevi, Indra. 2011. *Pengelolaan Pemerintahan di Wilayah Perbatasan*. Bidang Pengkajian P3DI Setjen DPR RI
- Pokja, Tannas. 2010. *Materi Pokok Ketahanan Nasional: Konsepsi dan tolok ukur*. Jakarta: Lemhannas RI
- Prakoso, Djoko, Bambang Riyadi Lany, Amir Mushsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Manajemen Persediaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ratminto dan Septi Winarsih, Atik. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Ripley, Randall. B. Franklin, Grace. A, 1989. *Policy Implementation and. Bureaucracy* (Second Edition). Chicago, Illinois : The Dorsey Press
- Ripley, Ronald B and Grace Franklin. 1986. *Policy Implementaion and. Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Rudy, T. May. 2006. *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Salindeho, Winsulangi., & Pitres Sombowadilr. 2008. *Daerah Perbatasan Keterbatasan Perbatasan*. Yogyakarta: FUSPAD
- Samekto, FX. Adji. 2009. *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bbakti
- Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Stephanie, K. Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press
- Susilo. 2002. *Manajemen Sumber Daya manusia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Tbaib, Dahlan *et.al*. 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Utomo, Warsito. 2000. *Dinamika administrasi publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance : Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia

- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zeithaml, Parasuraman dan Berry. 1990. *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Mereka yang Melakukan Tindakan Penyeludupan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Perpres No. 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Batas Landas Kontinen Indonesia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, diakses melalui http://bappeda.kepriprov.go.id/data/RPJMD_akhir/bab6_Strategi_dan_Kebijakan.pdf, pada 26 Februari 2019.

Jurnal dan Hasil Penelitian:

- Berry, L.L., Zeithaml, V.A. and Parasuraman, A. 1985. "Quality counts in services too." *Business Horizons*, Vol. 28 No. 3

- Hanita, Margaretha. 2006. "*Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan, Studi di Tiga Wilayah Perbatasan: Papua, Timor dan Kalimantan.*" Jurnal Aplikasi Kajian Stratejik 1 (1): 77-94.
- Hatten, K. J. and Hatten, M. L. "*Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability.*" Strategic Management Journal United States of America: Elsevier Inc, 1996
- Hatten, K. J. and Hatten, M. L. 1996. "*Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability.*" Strategic Management Journal. United States of America: Elsevier Inc.
- Jain, Sandeep Raj. 2012. "*Coordinated border management: the experience of Asia and the Pacific region.*" World Customs Journal, Volume 6, Number 1
- John G. Gunnell. 2013. "*The Reconstitution of Political Theory: David Easton, Behavioralism, and the Long Road to System,*" Journal of the History of the Behavioral Sciences
- K, Muh. Syaiful. "*Upaya POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Barang (Studi Kasus di Pare-pare)*
- Keban, T. Yeremias. 1995. "*Kinerja Organisasi Publik.* Bahan seminar sehari dalam rangka purna tugas Drs. Sedyono, Fisipol- UGM, Yogyakarta.
- Kemitraan. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia.* Partnership Policy Paper No. 2/2011.
- Muhammad, Simela Victor. 2015. *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia: Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat.* Juranl Politica Vol. 6 No. 1 Maret 2015.
- Polner, Mariya. 2010. "*Coordinated Border Management: From Theory To Practice*". World Customs Journal Volume 5, Number 2.
- Setiawan, Ary. 2013. "*Analisis Perbandingan Pembangunan Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Komparatif Pembangunan Perbatasan Sebatik-Tawau)*". e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 3, (2013): 695 <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/> (diakses 28 November 2018
- Sunandar, Heni Agus. 2012. *Penanggulangan Peredaran Gula Illegal Di Luar Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat Dengan Sarawak Oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.* Jurnal Nestor Magister Hukum, diakses dari

<https://www.neliti.com/id/search?q=Heni+Agus+Sunandar>, pada 26 Februari 2019.

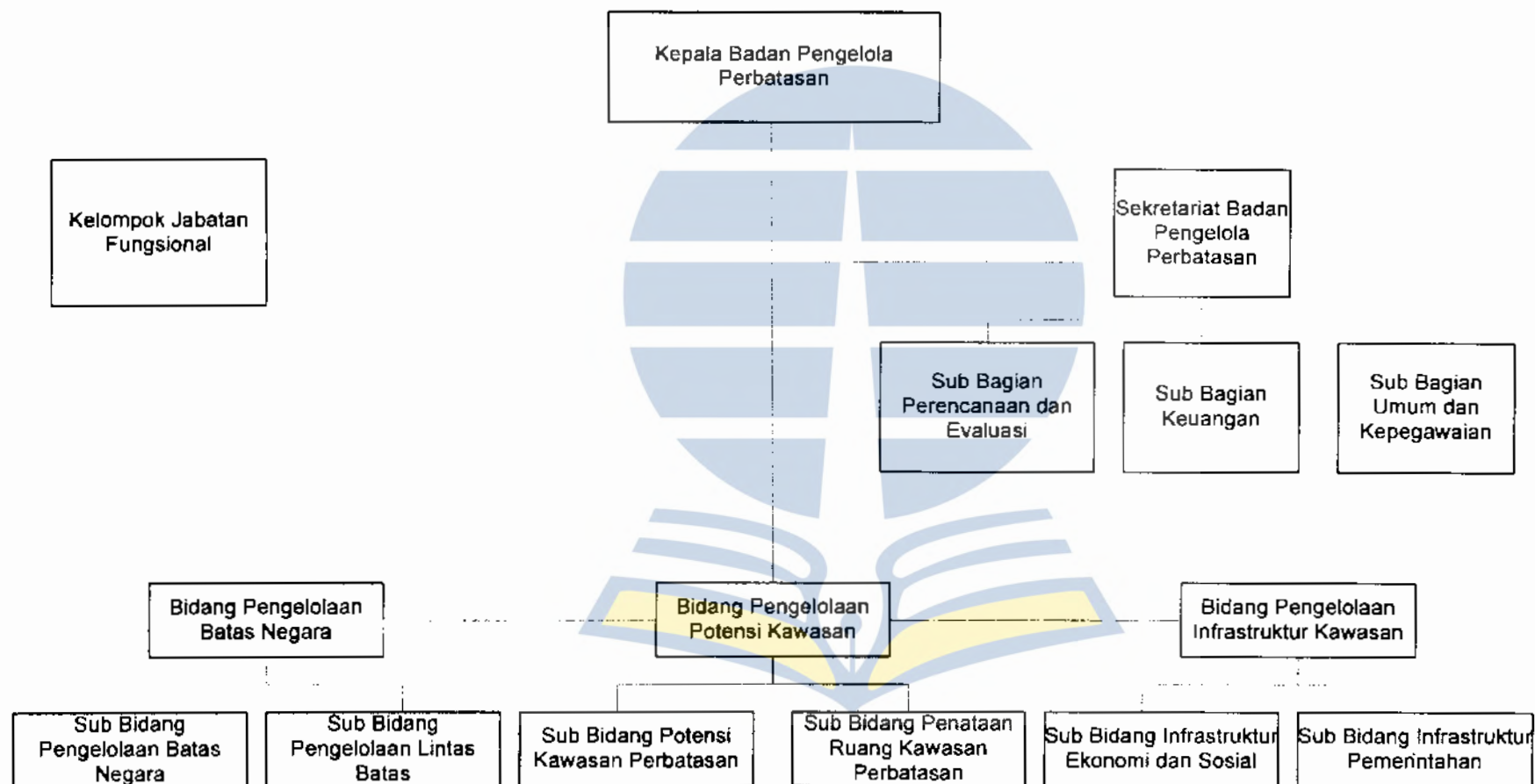
- Zaenuddin, Muhammad., Didi Istardi, dan Muslim Ansori. 2012. "*Maraknya Praktek Transaksi Ilegal di Kawasan Free Trade Zone Batam*" Jurnal Integrasi, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 83-98, apr. 2012. ISSN 2548-9828.
- Zulkifli., Latif, Abdul., & Karmilia, Rise. 2017. Resiko Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dengan Model Kerja Sama Ekonomi Internasional. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017

Situs Internet

- <http://batampos.co.id/23-09-2015/dirjen-bc-sebut-beras-impor-di-karimun-ilegal>
- <http://batampos.co.id/27-05-2013/bea-cukai-ngaku-kewalahan-atasi-masuknya-ponsel-ilegal-di-batam/>
- <http://batampos.co.id/27-10-2015/beras-impor-ilegal-beredar-di-batam-bea-cukai-mengaku-dikelabui-pengusaha/>
- <http://kepri.antaranews.com/berita/26496/bc-gagalkan-penyelundupan-kamera-rp6-miliar>
- <http://www.haluankepri.com/batam/83794-dua-truk-makanan-ilegal-dimusnahkan-.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=PoZQuQaTaw0>
- Muradi. 2016. *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia*, diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2016/05/04_pengelolaan-pengamanan-perbatasan-indonesia.pdf
- Seran, John Bernando. 2012. *Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional*. Tersedia di: <http://kupang.tribunnews.com/m/index.php/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-internasional>. (diakses tanggal 28 November 2018).
- www.tribunnews.com/regional/2012/12/24/bc-tanjungpinang-batalkan-penyelundupan-34-kg-heroin



Lampiran 1 Struktur Organisasi BPP Provinsi kepulauan Riau



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Bidang :

Jabatan :

Tanggal/tempat wawancara :

Mohon dijawab pertanyaan berikut disertai penjelasan dan data pendukungnya (dokumen)

A. Hukum dan Kebijakan

1. Kebijakan apa sajakah yang telah diimplementasikan di bidang Bapak/Ibu, yang terkait dengan pencegahan penyelundupan barang? Sebutkan
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan di bidang Bapak/Ibu untuk menjadikan sinergi atas hukum dan kebijakan tentang penyelundupan barang, yang berlaku di bidang Bapak/Ibu dengan di bidang lain, serta di instansi lain?
3. Apa sajakah rencana kerja yang telah disusun di bidang Bapak/Ibu untuk melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan barang?
4. Bagaimanakah sistem evaluasi pelaksanaan hukum dan kebijakan di bidang Bapak/Ibu, yang berkaitan dengan pencegahan penyelundupan barang?
5. Apa sajakah hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penyelundupan barang?
6. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan penyelundupan barang?

B. Keuangan

1. Berapakah dana yang dianggarkan secara khusus di bidang Bapak/Ibu untuk melakukan upaya pencegahan penyelundupan barang?
2. Bagaimanakah penggunaan dana tersebut selama ini?
3. Apakah dana tersebut mencukupi?

C. SDM

1. Berapa banyak petugas di Bidang Bapak/Ibu yang ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah pencegahan penyelundupan barang?
2. Apa sajakah tugas mereka?
3. Apakah jumlah tersebut mencukupi?
4. Apa sajakah keahlian mereka?
5. Apakah keahlian mereka sudah memadai?

D. Infrastruktur

1. Infrastruktur apa sajakah yang mendukung kinerja bidang Bapak/Ibu dalam upaya pencegahan penyelundupan barang?
2. Bagaimanakah kondisi infrastruktur tersebut?
3. Apakah jumlah infrastruktur tersebut memadai?
4. Infrastruktur apa sajakah yang belum tersedia? Berapa banyak yang dibutuhkan?
5. Apakah fungsi infrastruktur tersebut?
6. Apa dampak dari ketidaktersediaan infrastruktur tersebut?



Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Dengan Badan Kemanan Laut (David)

Tanya	:	Kebijakan apa sajakah yang telah diimplementasikan di implementasikan dibidang bapak yang terkait pencegahan dan penyelundupan barang ?
Jawab	:	Yang bisa saya jawab sebagai Ka Sub dit patroli keamanan laut zona maritime barat, yang pertama bisa kami sampaikan fungsi dari bakamla sendiri yaitu melaksanakan patrol keselamatan dilaut, mengimpelementasikannya dalam rangka pencegahan dan penyelundupan barang. Kami melaksanakan patroli didaerah-daerah yang menurut kami titik-titik itu rawan atau sering digunakan penyelundup untuk mengirim ataupun menerima barang. Pada bagaian yang terjauh kami mengirim kapal yang berukuran besar dan dihagian dalam dangakal kami mendeplay menurunkan kapal-kapal yang berukuran kecil , kemudian didaerah-daerah tertentu dimana kami memiliki alat server dan sistem yang bisa hidup selama 24 jam disitu ada alat pemantau automatic identification system, kemudian server system seperti radar, cctv, long range camera kemudian JDMSS dari situlah kami memonitor memadukan seluruh peralatan yang ada di sperti bakamla miliki saat ini di nongsa itu dapat dimonitor dari kantor jurna yang ada di sekupang. Ketika ada informasi awal yang didapat dari server system ataupun dari human intelegent itu ada beberapa tempat yang biasa mereka gunakan untuk itu kemuudia kami menurunkan beberapa asset seperti kapal Negara atau sea rader dimana kebiasaan mereka melakukan pengiriman atau peerimaan barang, itu yang dilaksanakan
Tanya	:	Bagaimanakah upaya yang dilakukan dibidang bapak untuk menjadikan sinergi atas hokum dan kebijakan tentang penyelundupan barang yang berlaku dibidang bapak dengan dibidang lain, serta diinstansi lainnya mohon penjelasanya pak
Jawab	:	Upaya Sinergitas yang dilakukan bakamla selama ini yaitu

dengan melaksanakan atau desa syahbandar dalam satu kapal itu punya beberapa orang yang berada di instansi lain tapi ikut on boath dalam kapal tersebut, setelah mereka on boath kami melaksanakan estalabis lokasi kemudian kami melaksanakan cek komunikasi yang berjalan dipusat dari sini menuju kapal masing-masing, kemudian berhenti kapal itupun kami men on boath kan itu ada satu orang dari lembaga sandi Negara, mereka membawa peralatan dari sendiri kemudian pengiriman beritanya itu dalam bentuk enkrip, jadi tidak bisa dari instansi lain membuka berita itu karena sifatnya berita yang digunakan dalam telegram nanti bersifat rahasia, maka pengiriman dan penerimaannya dienkrip. Kemudian setelah mereka sudah itu kami berangkat kejakarta untuk melaksanakan penyegaran seluruh informasi mensinergikan apa yang diterapkan masing-masing instansi karena mempunyai doktrin yang berbeda-beda, pelaksanaan operasi dilapangannya juga berbeda-beda maka ditempat itu kami mencoba mensinergikan, itu ditahap perencanaan. Di tahap pelaksanaan kemudian mereka kembali lagi kekapal masing-masing kemudian ditentukanlah dikler jam J pelaksanaan operasi kemudian, itu sudah sebelumnya kami sudah dalam tahap perencanaan kami sudah mengisi bahan bakar, kemudian belanja bahan makanan dan bahan basah. Kemudian pelaksanaan kita melaksanakan, kembali lagi masang radi chek kemudian kapal saat itu kapal memasuki sector yang ditentukan oleh pelaksana operasi harian yang ada di Jakarta melalui rencana operasi kemudian masih dijalankan selama hari yang ditentukan selama satu bulan atau tiga bulan, kemudian pelaksanaan operasinya dilaporkan secara terperiodik pagi dan sore kepada masing-masing zona, kemudian zona meneruskan ke Jakarta. Diakhir pengakhiran seluruh nahkoda atau komandan itu berkumpul disatu titik seperti di Jakarta atau batam sesuai kebijakan kemudian melaksanakan evaluasi atau whats up apakah Atau dalam bahasi kami namanya pul

		out,pul out itu kembali kemasing-masing pangkalan kemudian berkumpul dititik tertentu untuk melaksanakan ulasan atau kaji ulang setelah selesai kemudian mereka membuat laporan kegiatan pelaksanaan selama diadakannya operasi, setelah itu pertanggungjawabab keungan semuanya diberikan kepada kami, kemudian barang-barang tersebut kapal-kapal tersebut dikembalikan kepada masing-masing instansi
Tanya	:	oh begitu, berarti sudah termasuk system evalusai juga dengan pelaksanaan itu pak ?
Jawab	:	iya, tadi dipengakhiran itu pelaksanaan dan evaluasi, jadi ada perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran, dalam pengakhiran itu isinya evaluasi
Tanya	:	Saya lanjut ke poin, apa sajakah hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam mengimplementasikan hukumn dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelundupan barang
Jawab	:	Hambatan yang ditemui dalam menegakkan hukum dan kebijakan yang pertama yang kami temukan dilapangan, hambatan pertama yaitu luasnya wilayah kami yaitu dari aceh pantai timur dan barat sampai batam ini kemudian kita masuk kedaerah Bangka area pantainya yang begitu luas
Tanya	:	Sampai ke Babel ya ...
Jawab	:	Sampai Jakarta kemudian Natuna kemudian samai ke pangkalan Bun, garis pantai ini sangat luas, kemudian sampai ke pulau-pulau yang terbuka dimana mereka itu bisa masuk dan keluar tanpa pengawasan karena system-sistem yang ada disini itu tidak semuanya tertutupi. Jadi, kita ini berada didaerah yang terbuka kalo kita mungkin berada didaerah yang didepan sini keliatan tetapi ketika kita turun, kapal yang kita taruh disini semuanya itu tidak mencukupi garis pantai. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari budaya, budaya masyarakat yang di dumai dengan masyarakat yang ada di malaka itu sudah terjalin turun temurun. Jadi mereka sudah terbiasa melakukan pertukaran

seperti rokok dengan baju, dengan kayu dan beras, jadi sudah terjadi barter, kemudian daerah ini juga tidak terkontrol pengawasannya karena patroli tidak dilaksanakan terus menerus seharusnya di daerah ini dipasang system dimana kapal yang keluar masuk itu bisa terpantau dengan baik, namun kendalanya ketika kita minta disitu terkendala dengan birokrasinya, Indonesia I I terkenal dengan birokrasinya yang panjang, termasuk di Batam dimana kami membuat itu terkendala birokrasinya yang panjang. Yang kedua adalah budaya tadi yang berada di pesisir Sumatera bagian timur kemudian Malaysia bagian barat itu sudah terjalin, kita mencegah dengan memberikan pengertian kepada masyarakat pesisir ini tidak semua bisa mengerti karena pendidikan mereka tidak bisa memasuki tahapan itu, karena mereka mungkin bicaranya saya butuh makan, yang bisa dilakukan forum diskusi grup yang dilakukan kerjasama kami di daerah-daerah titik-titik tertentu itu juga melaksanakan itu forum diskusi grup apa yang menjadi masalah masing-masing kemudian kita berikan panduan hukum kepada mereka yang itu dilaksanakan di daerah-daerah tertentu seperti yang dilaksanakan kemarin oleh pak kepala melaksanakan informasi tentang hukum di kapal di daerah Moro kemarin itu sudah dilaksanakan oleh pak kepala. Itu tiga hal yang menurut kami menjadi kendala dan hambatan, yang pertama luasnya daerah sini kemudian yang kedua adalah faktor budaya, yang ketiga pendidikan masyarakat sendiri yang kami nilai masih belum, yang lainnya kurangnya kapal, harusnya lebih banyak lagi yang paling penting seperti yang dilakukan oleh Singapura kita mempunyai System tapi terlalu tinggi kita berpikirnya, jadi cakupan satu kapal itu kapal-kapal yang beroperasi disini, penyelundupan itu kan cuma dari Malaysia dan Singapura yang paling besar itu dilaksanakan, kalo kita bicara Thailand, Vietnam itu bunyinya penyelundupan ikan tapi kalo disini kenapa mereka melakukan penyelundupan, kami

		jaraknya dekat mereka dekat kesini daripada kejawa. kebutuhan kota besar kita yang ada di sumatera dan di medan mungkin tidak mencukupi disini, mungkin lebih baik pergi kesini daripada pergi ke medan saya rasa itu, tapi akhirnya kita aparat yang ada dilapangan sendiripun bingung gimana makanan yang ada di medan bisa sampai kesini, karena mereka sudah terbudaya, factor-faktor budaya yang menjadi hambatan kami dilapangan salah satunya.
Tanya	:	Baik pak, mungkin untuk poin hukum dan kebijakan sudah terjawab, kita masuk sebagian keuangannya pak, berapakah dana yang dianggarkan secara khusus dibidang bapak dalam upaya melakukan pencegahan penyelundupan barang, bagaimana pendanaan tersebut dan apakah pendanaan tersebut mencukupi ?
Jawab	:	Baik, kami menjawab yang lokasi kami saja, kami tidak bisa memberitahu berapa jumlah yang diberikan, kami melaksanakan kegiatan patroli didalamnya ada upaya pencegahan penyelundupan yang lainnya adalah dari Kemudian illegal fishing dari banyak sekali tindak pidana dilaut dan penyelundupan barang, kalau ditanya jumlahnya kami tidak bisa jawab karena itu berada dijakarta namun pelaksanaan dilapangannya kami mengoptimalkan seluruh penggunaan seperti bahan bakar yang diterima kemudian bahan makanan dalam satu bulan kami menerima jumlah makanan, jumlah uang untuk makanan untuk kami masak kemudian kami mendapat insentif dari kegiatan operasi tersebut yang satu harinya saya rasa dana yang digunakan dikapal sendiri untuk perbaikan, makan kemudian insentif sudah mencukupi
Tanya	:	Baik pak, kemudian kita masuk ke SDM nya pak, berapa banyak tugas dibidang bapak yang ditugaskan secara khusus untuk menangani pencegahan dan penyelundupan barang ?
Jawab	:	Baik tadi kami telah sampaikan, karena fungsi dari bakamla sendiri tidak pada fungsi penyelundupan saja, tapi pada fungsi yang lebih luas lagi bicara tentang maritime security pada

	<p>kegiatan-kegiatan dilaut termasuk keselamatan dan keamanan, diwilayah yuridiksi perairan Indonesia itu cukup luas namun dalam pelaksanaan operasinya secara khusus itu kita memberikan atau mendeplay atau mengirimkan aset-aset yang dimiliki seperti kapal Negara yang berada di daerah kami tapi karena cakupannya luas pada saat pelaksanaan operasi kita ada kapal Negara, yang didalamnya itu dikhususkan seperti bea cukai, perikanan. tapi seperti bea cukai masalah kepabeanan dan perikanan bicara perikanan saja, Tapi kita cakupannya global. dan orang-orang dan asset-aset yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu kita menggunakan asset Negara seperti kapal Negara, kemudian sea reder kemudian orang-orang yang mengawaki server system juga orang-orang intelejen jumlahnya satu kapal Negara itu sekitar 23 orang sampai 25 orang kemudian sea reder itu ada lima kemudian dalam kapal itu ada enam orang, pengawal yang ada di server system itu jumlahnya lima orang itu berada di daerah aceh, kemudian ada di natuna, kemudian ada di tanjungbalai karimun, kemudian ada di batam nongsa, stasiun satelit buminya ada di Bangka Belitung satu lagi ada di sambas namanya stasiun pemantau keamanan dan keselamatan laut (SPKKL)</p>
Tanya :	<p>Baik itu sudah terjawab masalah tugas, kemudian keahlian mereka itu apa saja pak, apakah keahlian mereka itu sudah memadai menurut bapak ?</p>
Jawab :	<p>Keahlian beberapa dari mereka, tidak semuanya, karena dari mereka itu belum diajarkan semua tapi mereka sudah diberikan semua pendidikan sebelum mengelola kegiatan tersebut, pada saat alat itu dipasang petugas yang berada di daerah tersebut atau tempat tersebut diadakan latihan penggunaan alat tersebut, seperti penggunaan radar, radio kemudian JMDSS, kemudian pemantau AIS, itu sudah diberikan pelatihan sebelumnya kemudian mereka juga ditambahi beberapa dari mereka diberangkatkan ke Rusia untuk bisa belajar, dimana</p>

	<p>mengoperasikan alat itu dengan menggunakan satelit, kemudian mereka juga beberapa kali dibawa ke Jakarta, untuk menerima pelajaran tentang gimana caranya baik itu operator secara teknis kemudian ada juga orang yang mampu menganalisa kegiatan yang sedang terjadi lalu lintas kapal karena kita inginnya kapal-kapal yang beroperasi diantara sumatera dan Malaysia di selat malaka, kemudian di daerah perbatasan singapura, selat singapura, kemudian alur laut Indonesia yang ada di laut natuna sampai selat sunda. daerah ini sangat padat lalu lintasnya sehingga kita membutuhkan orang yang mampu dapat memonitor juga menganalisa kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah ini.</p>
Tanya :	<p>Baik pak, mungkin kita masuk ke bidang terakhir, yaitu infrastruktur, infrastruktur apasajakah yang mendukung kinerja bidang bapak dalam upaya pencegahan dan penyelundupan barang serta bagaimana kondisi infrastruktur tersebut, apakah jumlah infrastruktur tersebut memadai, kemudian infrastruktur apasajakah yang belum tersedia berapa banyak yang dibutuhkan serta fungsi infrastruktur tersebut dan apa dampak dari ketidaktersedianya infrastruktur tersebut ? mohon penjelasannya pak</p>
Jawab :	<p>Infrastruktur yang mendukung saya dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penyelundupan di laut, yang pertama dalah sarana survile system yang bisa memonitor, tidak seperti manusia yang mudah lelah, kalau survile system itu melalui radar pemanatau automatic identification system kemudian CCTV atau long range camera, kemudian kita juga ada alat CCTV yang bisa dilihat malam hari, juga radar-radar yang bisa beroperasi pada saat hujan lebat dan kondisi-kondisi alam tertentu, itu alat-alat pendukung. Alat-alat utamanya penindaknya itu harus ada unsur aset-aset di laut itu seperti kapal-kapal patroli, kalau di bakamla disebut kapal Negara, kalau di angkatan lau penyebutannya kapal republik Indonesia, kemudian kalau di bea cukai namanya KP juga diperikanan namanya KP, kalau KPLP penyebutannya</p>

KN, itu harus ada kapal-kapal yang mampu beroperasi baik di pangkalan perairan dangkal kemudian jaraknya menengah sampai ZTE, itu ada kapal-kapal yang mampu beroperasi dengan kondisi karakteristik tertentu sehingga mereka bisa bertahan misalnya di laut cina selatan dengan waktu yang cukup lama. mereka harus didukung satu aset yang saat ini kita sebut dengan UAV, atau kita bisa buat kapal dengan drone yang berada di udara yang mampu beroperasi bergantian dimana kita bisa melihat real dengan radar yang kita miliki juga mereka terkoneksi disatu pusat kendali informasi sehingga pada saat kapal keluar masuk itu bisa termonitor oleh peralatan tersebut, apabila dari hasil analisis kapal itu mencurigakan atau mereka punya kriteria tersendiri sehingga pada saat ada dugaan tersebut dapat langsung kesana untuk melakukan penindakan hukum, seperti terjadi di laut cina selatan sana ada kapal ikan yang masuk ke daerah Indonesia kemudian di aksi oleh kapal perikanan dari KKP kemudian tiba-tiba ada support dari coast guardnya mereka, juga beberapa jam yang lalu kebelakang ada kapal dari Taiwan menyebar jaring di daerah mau masuk bagian timur aceh mereka mencari ikan di situ dan dilaksanakan pengusiran atau pengakapan tindakan hukum lainnya pada saat prosedur itu ditembak akhirnya mereka melarikan diri, itu sangat bisa dilakukan dengan cepat apabila kita mempunyai peralatan yang memantau mereka selama 24 jam yaitu servant system yang terbang, kalau singapura namanya AX atau Aua Really Warning, dia selalu berada diudara kemudian ketika dia turun , naik lagi jadi dia berada di udara selama 6-8 jam cumin mereka bisa naik secara bergantian, cumin cakupan Indonesia begitu luas berapa kapal yang harus disiapkan jadi pesawat yang harus bisa mantau. Kemudian kondisi infrastruktur yang saat ini kita miliki disamping tadi kami harus punya kapal, asset laut asset udara kami juga harus punya landasannya kemudian kita harus punya dermaganya , kalau kita bicara dermaga yang ada di batam saat

ini dermaga lumayan banyak jadi bisa digunakan kapal kapan saja namun ketika kita bicara penggunaan bahan bakar pada saat kapal sandar itukan harus ada dermaga maka kita bicara dukungan, pertama ada dukungan air tawar, kemudian dukungan bahan bakar, kemudian dukungan listrik, kemudian dukungan sarana olahraga mereka kemudian kita menyiapkan tempat tinggal mereka, kendaraan yang mereka butuhkan untuk rekreasi, dan sarana ibadah mereka. Kebutuhan minyak disana kalau di anambas berbeda dengan di ranai, kalau di anambas itu ada kilang yang dimana bisa isi terus tapi kalau di ranai tidak ada, kita harus bisa mensupport logistic mereka juga peralatan kalau seandainya kapal itu rusak , jadi ada suku cadang yang bisa dikirim ke mereka karena kalau mereka di sana rusak daerah-daerah yang bisa melaksanakan perbaikan itu hanya di batam, di daerah natuna dan anambas itu tidak ada, itu sarana-sarana yang bisa mendukung infrastruktur kondisinya semua masih baik, jumlah infrastruktur yang tersebut saat ini di natuna sudah ada empat, natuna itu kita bicarakan ada anambas dan ranai, itu sudah ada radar, ada dermaga, ada landasan udara, sudah ada semua. Kemudian tangki minyaknya ada di Ranai, di anambas ada cumin tidak besar. Fungsi yang belum tersedia, kalau bicara ini bagaimana mendeplay semua unsure-unsur kapal yang ada digaris depan, saat ini semua daerah yang kosong ini ketika kita bicara kalau dari batam, tanjungbalai karimu, tanjungbalai karimun ke dumai, tanjung laik ke tanjung asahan, tanjung asahan ke belawan, belawan kemudian ke rengkuku, rengkuku ke malahyati, malahyati ke nangroe aceh Darussalam itu ada beberapa, ada banyak dermaga di wilayah tersebut namun kalau kita bicara tanjung balai asahan itu belum mencukupi karena alur masuknya itu tidak dalam sehingga tidak banyak seorang komandan pengambil keputusan itu berani masuk ke dalam, kalau kita bicara di dumai itu alurnya cukup luas jadi berani, ada daerah-daerah yang kosong di situ, sebenarnya dari dumai kita

	<p>bisa berangkat ke sana cuman hanya tidak semua, itu terpusat batam ini menjadi tempat terpusat dimana seringnya terjadi tindakan illegal ini membuat seluruh instansi ini mendeplay seluruh asctnya di batam, jadi batam ini sudah cukup dermaga, cukup bahan bakar, cukup kegiatan-kegiatan yang mendukung satuan-satuan operasi di lapangan untuk melaksanakan operasional sebab mereka bisa berjalan sesuai waktu yang ditentukan oleh masing-masing instansi kemudian fungsi infrastruktur tersebut menyediakan sarana prasarana seperti air tawar, pendukung bahan bakar, kemudian sarana olahraga, kemudian sarana rekreasi, kemudian sarana perbaikan, perbaikan apabila terjadi kerusakan, itu fungsi infrastruktu yang harus ada tersebut. Kemudian kalau suatu infrastruktur tidak tersedia alat-alat tersebut jelas akan mengganggu rangakain perjalanan kegiatan unsure-unsur atau asset-aset yang ada dilapangan, kalau kita bicara di singapura mereka sudah melakukan metode yang belum dilakukan di asia, singapura sudah menyiapkan infrastruktur yang bisa melakukan kegiatan operasi yang lain dari pada yang lain, dia gimana ketika kapal selam amerika rrusak dia bisa melaksanakan perbaikan, kita sebenarnya kapal selam juga satuan-satuan paling depan berdasarkan kegiatan operasi, ada operasi keselamatan dan operasi keamanan, kalau fungsi kapal selamkan fungsi keamanan jadi apabila nanti yang di Surabaya ke Jakarta terjadi kerusakan kita disini bicaranya masih belum karena strategis, tapi di singapura sudah menyiapkan sampai peta di dalampun sudah menyiapkan, dan kita sudah mengembangkan infrastruktur yang terbaru yaitu namanya Air Of Fay, suatu kendaraan bawah air yang dapat memonitor salah satu kapal, kita punya satu infrastrukut yang dapat memonitor kegiatan bawah air, sudah ditempatkan disalah satu kapal di KN Bintang, itu sudah berjalan.</p>

Dengan POLDA Kepri (Haris)

Tanya	:	Selamat siang pak haris, atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan waktu pada kami dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul upaya badan pengelola perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengamankan wilayah NKRI studi kasusnya yaitu penyelundupan barang, jadi ada beberapa haal yang ingin kami tanyakan pertama dalam bidang hukum dan kebijakan, pertanyaan pertama kami kebijakan apasajakah yang telah diimplementasikan di bidang bapak yang terkait dengan pencegahan dan penyelundupan barang ?
Jawab	:	Kalau dibilang dari segi, karena background saya dari polda, jadi kebijakan yang diimplementasikan dari bidang polisi keseluruhan, karcna sebenarnya bidang yang menangani bidang Polair dan Krimsus, jadi kalau kebijakan kita mengarah dari arahan dari bapak kapolda, sesuai dengan arahan bapak kapolri juga bahwa penyelundupan ini menjadi penanganan khusus yang perlu eksistensinya selalu ada setiap bulan dan setiap harinya
Tanya	:	Baik pak, mungkin masuk ke poin 2, bagaimanakah upaya yang dilakukan di bidang bapak untuk menjadikan sinergi atas hukum dan kebijakan tentang penyelundupan barang di bidang lain dan instansi lainnya ?
Jawab	:	Oke dengan instansi-instansi lain, kita mincipatakan sinergi yang mengarah pada hkum dan kebijakan yang perlu memiliki sati visi dan misi yang sama, penyelundupan barang ini menjadi salah satu perbatian bapak kapolri, khususnya kalau di batam ini bapak kapolda untuk melaksanakan pencegahan bahkan juga melaksanakan tindakan-tindakan prefensif untuk para penyelundup barang yang masuk ke wilayah Kepri sini, dan instansi lain kita sering berkoordinasi bersama dalam satu bulan sekali duduk bersama kita melaksanakan koordinasi dengan instansi lain, seperti bea cukai, dengan angkatan laut, dan bakamla, bagaimana kita melakukan teknik dan kerjasama yang

		baik untuk mencegah penyelundupan barang masuk ke wilayah kepri ini.
Tanya	:	Baik pak aris, apa saja, yang menjadi hambatan dan upaya apa untuk mengatasi hambatan tersebut serta bagaimana system evaluasi pelaksana hokum dan kebijakan di bidang bapak yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelundupan barang ini ?
Jawab	:	Hambatan yang terjadi yaitu pada saat pelaksanaan biasanya kalau kita sedang berkoordinasi di tingkat instansi itu terjadi pada saat pelaksanaan, masing-masing instansi memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda dalam pencegahan dan penyelundupan barang ini, contohnya ini sebenarnya lebih intens kea rah bea cukai, karena bea cukai memiliki Undang-Undang tentang pencegahan dan penyelundupan, tetapi kami selaku di Polri dan di Polda juga, polisi perairan dan polisi krimsus kami juga memiliki Undang-Undang yang bisa melaksanakan pencegahan tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan dilapangan kurang adanya koordinasi dengan instansi terkait, khususnya bea cukai dengan instansi-instansi lainnya.
Tanya	:	Baik pak, itu hambatannya, mengatasinya mungkin dengan berkoordinasi lebih baik dengan mereka
Jawab	:	Iya, berkoordinasinya yang lebih penting adalah tidak hanya berkoordinasi ditingkat kantor saja tetapi lebih baiknya kita berkoordinasi lagi ditingkat lapangan, seperti melakukan patroli bersama dengan instansi terkait terus sama-sama sharing, wilayah-wilayah mana yang rawan terhadap penyelundupan sehingga kita mengadakan patroli bersama dengan jam-jam yang sudah kita tentukan disaat jam-jam rawan, biasa penyelundup ini memiliki jam-jam khusus, jadi mereka juga memiliki intelejen khusus, jadi mereke memberi informasi siapa saja petugas yang mengamankan pada saat itu, jadi kita perlu koordinasi langsung di lapangan dengan instansi lainnya,
Tanya	:	Untuk evaluasi pelaksanaan hukumnya implementasi di bidang bapak ?

Jawab	: Untuk evaluasi bahwa sebenarnya ini keterkaitan dari kebijakan kita dari polda dan polisi, sebenarnya evaluasinya adalah kita perlu adanya suatu hukum dan kebijakan yang memang disepakati oleh seluruh instansi terkait karena penyelundupan kepri ini wilayah perairan 96% dan hanya 4% wilayah daratan, maka instansin yang terpenting adalah instansi yang terkait dengan perairan, seperti polisi perairan, bea cukai, ada imigrasi, disitu juga ada angkatan laut, sehingga kita perlu adanya satu hukum dan kebijakan yang seperti MoU atau kerjasama untuk menangani penyelundupan ini secara bersama sama
Tanya	: Baik, mungkin untuk hukum dan kebijakan sudah bapak aris jelaskan, kemudian mungkin saya akan masuk ke point keuangan, berapa dana yang dianggarkan secara khusus dibidang bapak dan bagaimana penggunaan dana tersebut, apakah dana tersebut mencukupi menurut bapak ?
Jawab	: Kalau untuk dana secara khusus untuk tahun 2016 ini saja, kita dari pihak kepolisian memberikan dana yang cukup meningkat, karena pada saat ini pihak kepolisian mengadakan untuk mensupporting BBM polisi perairan, jadi bahan bakar kapal-kapal polisi perairan itu meningkat sampai 55%, yang dulu didukung hanya sekitar 10% - 30% sekarang meningkat sampai 55% secara total itu tidak bisa saya sebutkan karena ini dibidang anggaran, anggaran dari pihak polda. Terus, penggunaan dana tersebut kita disetiap pencegahan dan penyelundupan itu biasanya kita punya program yang diatur dalam rengiat harian, rengiat mingguan dan renggiat bulanan, renggiat mingguan atau bulanan ini diatur dengan penggunaan kapal-kapal yang akan melaksanakan patroli di wilayah-wilayah yang rawan dengan penyelundupan, jadi penggunaan dana tersebut langsung ke pihak user atau polisi perairan sebagai gerbang terdepan untuk mengatasi permasalahan penyelundupan ini di wilayah perairan kepri, dana tersebut sampai saat ini kami belum bisa bilang belum cukup karena untuk anggaran patroli yang seharusnya itu

	<p>seperti contoh kita bandingkan dengan coast guard singapura atau coast marine singapura, mereka memiliki anggaran yang cukup untuk BBM itu, anggaranya system dua satu, jadi dua hari bekerja satu hari istirahat. Sedangkan untuk program polair sendiri polda kepri sendiri tidak ada program yang harus rutinitas disitu mereka wialayah ditaruhkan kapal ditaruhkan tetapi mereka tidak melaksanakn patroli sehingga penyelundupan masih banyak yang masuk ke wilayah kepri, sehingga dana tersebut menurut saya masih kurang cukup untuk mengatasi penyelundupan di wialayh kepri</p>
Tanya :	<p>Baik pak, untuk keuangan saya rasa jelas, mungkin ditangani khusus hagian keuangan ya pak, masuk kepada SDM, berapa banyak petugas dibidang bapak yang secara khusus menangani pencegahan dan penyelundupan terus apasaja tugas mereka, jumlah mereka, apa saja keahlian mereka dan apakah keahlian mereka itu sudah memadai pak ?</p>
Jawab :	<p>: Saya jawaab, satu persatu dulu, untuk petugas yang menangani masalah penyelundupan disini dari pihak polda itu da dua instansi, yang memang focus untuk pencegahan dan penyelundupan yang pertama adalah polisi perairan dan yang keduam adalah polisi krimsus, krimsus ini dia menangani penyelundupan terhadap illegal maining ataupun penyelundupan dibidang lainnya, tetapi dua instansi itulah yang penyelundupannya paling besar, karena mereka memang khusus menangani pencegahan dan penyelundupan, Karena pemyelundupan ini paling banyak melalui laut dan melalui daratpun sudah ada, dan tugas mereka, mereka melakukan patroli rutin, dan patroli rutin itu sudah diatur dalam rencana kegiatan yang saya sebutkan tadi, dan jumlahnya kalau menurut saya karena jumlahnya contoh batam, batam itu yang terdata sampai sekarang hampir ada ratusan pelabuhan tikus dan pelabuhan tikus itu adalah tempat dimana semua penyelundup bisa memasuki wilayah tersebut tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian dan</p>

	<p>apabila kita bandingkan pelabuhan tikus yang ada di wilayah batam dengan jumlah personil yang melaksanakan patroli, itu tidak mencukupi sekali karena jumlahnya pasti akan kurang, kalau kita menjaga satu wilayah dengan wilayah lain itu sangat kurang cukup untuk pengawasan dan penyelundupan, di bidang penyelundupan ini. Kalau dibidang keahlian kepolisian sendiri tidak memiliki SDM yang benar-benar ahli dalam arti kata hanya sebagian saja dalam melaksanakan patroli dalam satu hari kepolisian hanya dalam patroli kita menempatkan 30 personil dalam satu hari sedangkan ada hampir ratusan pelabuhan tikus yang ada di batam, dan SDMnya masih kurang memahami bagaimana tugas pokoknya, tugas masing-masing dalam menangani pencegahan dan penyelundupan ini, dan menurut saya keahlian mereka masih kurang memadai.</p>
Tanya :	<p>Baik pak, saya sudah dijelaskan, masuk ke poin terakhir pak infrastruktur, infrastruktur apa sajakah yang mendukung kinerja bidang bapak dalam upaya pencegahan dan penyelundupan barang dan bagaimana kondisi infrastruktur tersebut apakah kondisi infrastruktur tersebut memadai, infrastruktur apa saja yang tersedia, berapa banyak yang dibutuhkan apa fungsi infrastruktur tersebut dan apa dampak dari ketidak tersedianya infrastruktur tersebut pak ?</p>
Jawab :	<p>Jadi kita jawab satu persatu mengenai infrastruktur apa saja yang mendukung kinerja, dalam upaya pencegahan dan penyelundupan di Kepri ini, infrastruktur yang kita miliki hanya infrastruktur yaitu pelabuhan polair, sedang ada dermaga polair dan juga didukung dengan kapal-kapal patroli, tetapi kapal-kapal patroli yang kita miliki kepolisian itu kapal patroli yang bertipe C, jadi untuk kapal patroli itu ada 3 tipe yaitu tipe C, tipe B dan tipe A. Dengan wilayah kepri yang 96% adalah wilayah perairan dan penempatan kapal patroli yang didukung kapal tipe C sehingga kondisi optimalisasi pencegahannya masih kurang maksimal, dan kondisi infrastruktur tersebut karena dermaga bisa</p>

	<p>kita adanya perawatan yang memadai tetapi luas dermaga tersebut tidak bisa menampung jumlah kapal-kapal yang kita tangkap atau sedang dalam proses pengadilan itu kita jadikan sebagai barang bukti dan kita taruh, belum bisa memadai karena dermaga cukup kecil, kondisi kapal tersebut masih perlu banyak maintenance karena kapal tersebut bukan dibeli dari Indonesia tapi banyak peralatan yang dari luar sehingga pada saat maintenance itu dengan kurangnya SDM memahami bagaimana maintenance perawatan kapal, sehingga kapal tersebut kerjanya masih kurang karena ada kapal yang sedang dop dan persiapan perbaikan, dan yang tersedia hanya itu saja dan fungsi dari kapal tersebut masih kurang maksimal, kenapa saya bilang kurang maksimal karena yang saya bilang tadi dengan adanya ratusan pelabuhan tikus dengan luas wilayah 96% dan adanya jam-jam rawan yang terjadi di wilayah perairan kepri ini sedangkan infrastruktu yang ada itu tidak memadai dan cukup kurang, itu saja.</p>
Tanya	<p>: Oke, tampaknya sudah lengkap ini pak pertanyaan dari kami, terimakasih banyak atas waktu dan kesempatannya, selamat siang pak aris</p>

Dengan Bea Cukai (Febra)

Tanya	<p>: Selamat pagi pak febra terimakasih atas kesempatannya, waktunya untuk kami wawancarai terkait mengenai thesis kami yang berjudul upaya badan pengelola perbatasan provinsi Kepulauan Riau ,dalam menjaga kedaulatan NKRI. Studi kasusnya itu tentang Penyeludupan barang.</p>
Tanya	<p>: Kebijakan apa saja yang telah di implementasikan di bidang bapak yang terkait dengan pencegahan penyeludupan barang?</p>
Jawab	<p>: ok pak,saya sebagai kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengwasan dan pelayanan pihak BeaCukai Tanjungpinang, Catatan saya sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. tugasnya adalah pengawasan barang-barang yang masuk dari luar negri kedalam daerah indonesia,</p>

	<p>maksudnya daerah Indonesia adalah daerah seluruh wilayah Indonesia baik darat, laut, maupun udara. ada di UU no 10 tentang kepatenan . Mengingat kantor pelayanan dan pengawasan di kota tanjungpinang membawahi wilayahnya di pulau bintan. pulau bintan adalah pulau yang terletak dekat dengan singapur maupun malaisia ,tugas kita disini melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke wilayah tanjungpinang, terutama prakteknya di tanjungpinang ini adalah barang-barang yang masuk dari singapur dan malaisia dengan menggunakan kapal kayu dan dari situ kita melakukan pengawasan ,apakah barang-barang yang masuk ke tanjungpinang sesuai dengan dokumennya. Baik dokumen kapal maupun dokumen lain sebagainya.</p>
Tanya	<p>: masuk ke point ke duanya pak?..Bagaimana upaya yang dilakukan di bidang bapak untuk menjadikan sinergi atas hukum dan kebijakan yang dilakukan penyeludupan barang yang berlaku di bidang bapak dengan di bidang lainnya dan instansi lainnya.</p>
Jawab	<p>: kalau bicara tentang hukum... ,kita mengacunya kepada, kalau bea cukai UU NO 10 tentang kepatenan . kalau hukum di UU kita tu ada 2 kategori, atau hukum pidana dan hukum yang bersifat dengan sanksi ,sanksi administrasi atau sanksi denda maupun sanksi lainnya. Pertanyaannya adalah hukum yang berkaitan tentang penyeludupan barang. itu pengacunya pada pasal 102 ,103 sampai pasal 105 UU kepatenan ,intinya kalau pasal 102 ialah barang barang yang berasal dari luar negeri masuk ke wilayah tanjungpinang (impor) kalau pasal 103 untuk barang yang ke luar (ekspor) dari pinang ke negara lain. selama ini saya bertembatan dari tahun 2015, banyak beberapa hal yang kita lakukan penegak terkait dengan barang barang yang tidak ada dokumennya atau istilahnya barang penyeludupan. kalau penyeludupan disini adalah barang barang yang tidak memenuhi ketentuan ada dokumennya yang terkait dengan perhatian.</p>

		<p>Contohnya es ,barang haru dilindung,barang di atas kapal harus sesuai kondisi yang sebenarnya. pengawasan yang dilakukan di atas kapal. pada saat kapal bersandar ,pertama kali pihak beacukai lakukan adalah pengecekan apakah dokumen kapal sesuai atau tidak. kalau misalnya tidak ada ketentuan sama sekali sama . dan itu pernah kita lakukan dengan kapal pesiar(kapal pribadi) dari singapur 2 kali kita tangkap. kemudian kapal prihadi. ketentuan kita apahila tidak melampirkan atau pemberitahuan pada pihak beacukai baik pada atau manifest. karna ini kapal tidak ada keterangan lain. dikenakan sanksi administrasi ,kemarin kita kenakan rksp 5juta dan 10 juta manifest. barang-barang yang sebagian kita tegak sebagian besal dari Batam, jadi pengalaman kita dari malaisya menangkap dari 2013 baik beras,gula, bawang ,hp, rokok,dan lain sebagainya itu dari batam. batam masih wilayah indonesia kita koordinasi pada pihak beacukai batam, kita selesaikan dengan barang dikuasai negara. contoh yang kepolisian , kita selama ini memang belum ada penyidikan. Jadi kalau ada penyidikan, jika ada penyidikan kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian berkaitan dengan penyidikan. sanksi lainnya juga kita biasanya itu sama dibantu dengan TNI-AL ,POMAL,MARINIR dengan selama ini membantu apabila ada pihak-pihak yang selain tenaga kita, bantu kita permasalahan di lapangan.</p>
Tanya	:	<p>masuk kepoint ke tiga pak?...Apa saja rencana kerja yang disusun di bidang bapak untuk melakukan pencegaan. mungkin bisa sejalan dengan ini pak,point 4 sistem evaluasi pelaksana hukum kegiatan di bidang bapak nanti..</p>
Jawab	:	<p>jadi yang berkaitan dengan rencana kerja mengingat wilayah Tanjungpinang ini berpaspasan dengan singapur dan malaisya dan sebagian besar terjadi di perairan yang luas maka kita aktifkan atau kita optimalkan kapal-kapal patroli beacukai, beacukai punya kapal patroli cina 3 . ukuran 10m satu dan 14m dua. kita melakukan patroli laut yang selama ini kita lakukan , I</p>

		bulan minimal 1 kali. tahun 2016 ini hampir sama dengan tahun 2015 totalnya 24 kali. tahun kemarin ada juga yang kita tangkap barang elektronik yang di bawa oleh pompong-pompong yang dari batam.
Tanya	:	itu beacukai sendiri atau gabungan pak?....
Jawab	:	itu beacukai sendiri, karna kita memang ada jumlah kita, kita gabungan itu apabila beacukai biasa perlu, jadi kita melakukan sendiri dulu sesuai dengan jumlah dari mentri keuangan tugas pelaksanaan. sepanjang itu kita lakukan oleh beacukai kita tidak akan melibatkan instansi lain. terkait dengan pengawasan barang-barang yang dari luar yang biasa di kuasai adalah NPP, jadi selama disini saya sering sekali nangkap ,dari mulai NARKOTIKA. jenisnya sabu-sabu ada 2,5 kg yang paling besar dan ada yang 2kg, 370gr , hahakan ada pil ekstasi pernah ketangkap di dompetnya. biasanya kita koordinasi dengan kepolisian ,baik polres dan BNN KOTA, Karna kita mengajukan pelayanan . Rokok juga dan minumann keras ya minimal kandungan alkoholnya 5%. jika di atas 5% delekati beacukai nah itu kita melakukan pengawasan. uniknya di wilayah pulau Bintan ini, sebagian minuman harus punya izin dari pihak beacukai dulu. ternyata masih banya yang belum izin dari bacukai, padahal sudah di sosialisasi urutan kitakan apakah memang penjualannya ada yang gak ngerti sosialisasi dalam waktu satu bulan kita chek lagi. kalau tetap masi nakal kita ambil dan disuruh untuk ngurus izin-izinnya dan masih lakukan juga, ada di ketentuan kita juga dikenakan sanki 20juta .Kita pernah terapkan juga terkait dengan minuman . Rokok juga kita sosialisasi. kita biasanya melakukan operasi pasar, jadi kita lihat 1 sampai 2 bulan di lakukan operasi pasar. apakah bener sesuai dengan ketentuan beacukai.
Tanya	:	Biasanya yang jadi hambatan itu pak?...dalam mengimplentasi hukum apa saja pak, kemudian apa upayanya?...
Jawab	:	hak paten kita tuh, pertama adalah terkait dengan wilayah kerja,

		<p>pertama wilayah bintang itu ada 3 kantor. kantor tanjung uban , tanjungpinang ,dan dikijang. dengan adanya reorganisasi beacukai ,3 kantor jadi satu dan di kumpulkan di tanjungpinang, 2008 jadi satu semua . kemudian pegawai total 18 orang, termasuk saya,dan kepala sub seksi 3 orang kemudian kita harus menguasai seluruh pulau bintang plus lautannya. dari mulai perbatasan singapur, antisipasinya kita dengan keterbatasan keternagakerja ,karna kita disini beacukai itu menurut saya. pulau bintang ini termasuk beacukai paling lengkap. barang dari luar masuk barang-barang ekspornya termasuk ikan dan karet dan testil ada cukainya ,cukai itu minuman miras. antisipasi kalau orang-orang bawa terutama narkoba. sebetulnya ada kantor pos juga. solusinya adalah ,kita ada 3 anggota korlap , di lapangan. dan di perkecil lagi ada koordinator lapangan (tanjungpinang, kijang,dan tanjunguban)</p>
Tanya	:	<p>berarti sudah terjawab juga mengenai SDMnya berapa banyak petugas di bidang- bidang bapak dan apajasa tugas sub seksi ,apa keahlian mereka sudah memadai menurut bapak.?....</p>
Jawab	:	<p>terkait itu adakita namai diklat rutin , ada namanya diklat pelatihan yang fisik. kondisi ditanjungpinang ini rata-rata pegawainya orang tua lulusan SMA, dan ada tambahan 15 orang SI , namanya peraturan dan perubahan peningkatan keahlian itu dengan PDOKP(Pembinaan,keterampilan,dan pengetahuan Beacukainya diadakan 1 bulan disini. selain kita rutin mengawasi narkoba kita memiliki tim khusus narkoba, pembicaranya dari pusat dalam pelatihan. yang terkait dengan keahlian, jadi kalau bilang memadai . menurut saya sudah cukup, cuman harus ada peningkatan terus menerus.</p>
Tanya	:	<p>trus masalah keuangan , berada dana yang dianggarkan secara khusus di bidang bapak,untuk melakukan pencegahan,bagaimana penggunaannya, apakah dana itu mencukupi menurut bapak?...</p>
Jawab	:	<p>dana anggaran pusat dan dari sini mendapatkan dari pusat, karna tiap bulan melaporkan juga. masalah jumlahnya kita kurang etis</p>

		juga. tapi cukup lah...karna kita juga disiapkan kapal trus kendaraan patroli dan uang bensinnya itu.
Tanya	:	itu sudah masuk dibagian infrastruktur ,apa saja yang mendukung kinerja bapak , kondisinya dan jumlahnya, dan apa saja yang belum tersedia, fungsinya apa . kemudian apa dampak ketidakterediaan barang tersebut...
Jawab	:	dari sisi fasilitas dan prasarana kita sudah cukup. Kapal patroli ada, kendaraan dinas, baik roda 4 maupun roda 2. selanjutnya alat-alat teksi narkoba maupun pita cukai ,kemudian untuk minyaknya baik kendaraan laut maupun darat juga disiapkan. kendalanya di ujung . eksre yang lama. barang bawaan pakai eksre, itu kondisinya sudah lama . tetapi sudah beberapa di perbaiki. kemudian kita mau tingkatkan di kapal karna pendektasian itu terhadap kapal-kapal yang tidak ada dokumennya tu agak kesulitan. palagi jika modusnya lampu dimatikan, jadi agak sulit, kemarin sudah kami minta itu radar canggih. bulan maren radar canggih sudah dikasih dan diterima. jika lampunya dimatikan masih kelihatan. saat ini yang di lakukan pembaharuan...

